

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN  
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
POTENSI PARIWISATA  
( Studi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**DONI APRIADI**

**NPM : 1321020157**

**JURUSAN SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN )  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

## **ABSTRAK**

**Oleh : Doni Apriadi**

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai banyak tempat wisata yang sangat potensial jika di kembangkan dengan baik, dan sudah berjalan selama ini ada 12 pariwisata yang dikontrol pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dari keseluruhan pariwisata yang ada di pesisir barat itu merupakan pendapatan anggaran daerah (PAD) kabupaten pesisir barat semenjak pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah peranan dan kontribusi Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dikarenakan keterbatasan anggaran yang diberikan membuat program tidak dapat berjalan maksimal besarnya retribusi perbulan yang disetor oleh pengelola objek wisata kepada pemerintah daerah bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh intensitas kunjungan para wisatawan ke setiap objek wisata. Semakin tinggi intensitas wisatawan mengunjungi objek wisata, maka retribusi yang disetor ke pemerintah daerah juga akan meningkat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui seperti apa peranan dan kontribusi Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat dan Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir Barat. Penulis mengadakan penelitian ini dikarenakan di Kabupaten Pesisir Barat potensi besar pariwisata.

Meskipun Pesisir Barat memiliki sejumlah potensi alam dan budaya yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap secara maksimal. Banyak pengelolaan wisata alam dan budaya di Pesisir Barat dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata di berbagai tempat objek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat, Islam memperbolehkan untuk mengelola potensi wisata alam asal sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam serta untuk memberikan kesadaran kepada makhluknya yang diberi amanat sebagai khalifah agar dapat mengetahui kebenaran dan kebesaran serta kemahakuasaan-Nya Allah swt.

Kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Barat seharusnya lebih memperhatikan SDM di Dinas Pariwisata yang masih belum maksimal dari segi kuantitas, serta masyarakat juga semestinya membantu menjaga infrastruktur sarana dan prasaranya yang ada, akan lebih baik jika pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat ditingkatkan dengan membantu mensosialisasikan secara langsung kepada wisatawan yang datang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

**PERSETUJUAN**

Nama : DONI APRIADI  
NPM : 1321020157  
Jurusan : SIYASAH  
Fakultas : SYARI'AH  
Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP  
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ( Studi  
di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dra. Firdaweri, M.H.I.**  
**NIP. 195509191982032004**

Pembimbing II

**Eti Karini, S.H., M. Hum.**  
**NIP. 197308162003122003**

Ketua Jurusan Siyasa

**Drs. Susiadi AS., M.Sos.I**  
**NIP. 195808171993301002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ( Studi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)**. Disusun oleh : **Doni Apriadi, NPM : 1321020157**, Jurusan : **Siyasah**, telah diujikan dalam siding munaqasyah Fakultas Syari'ah, pada hari tanggal : **Jum'at, 13 Juli 2018**.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Sekretaris : **Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy.**

Penguji I : **Dr. Jayusman, M.Ag.**

Penguji II : **Eti Karini, S.H. M.Hum.**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Dr. Agustina Nurhayati, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197009011997031002**

### **MOTTO**

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (Q.S. Al-Imron : 190) <sup>1</sup>



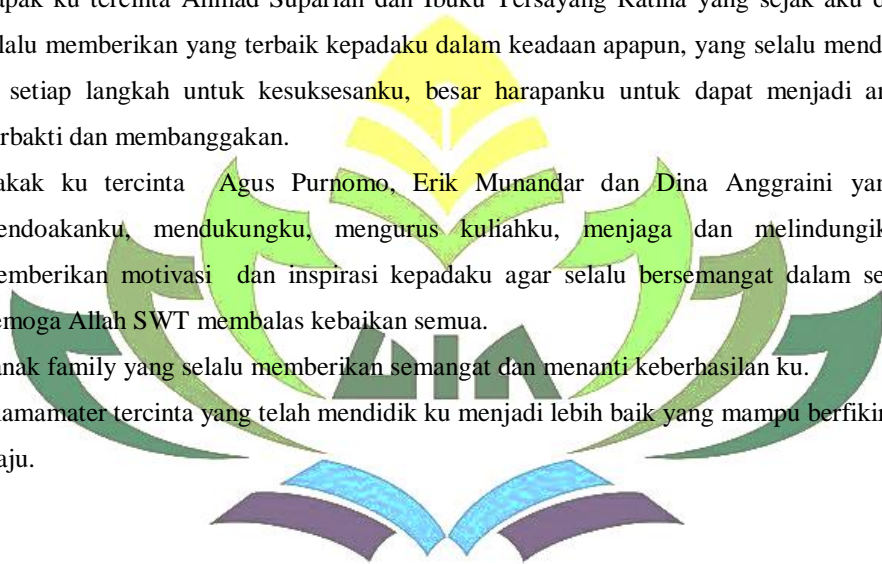
---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Semarang: CV.Toha putra, 1989),

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah . Rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karna atas izin dan Ridho-nya yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada :

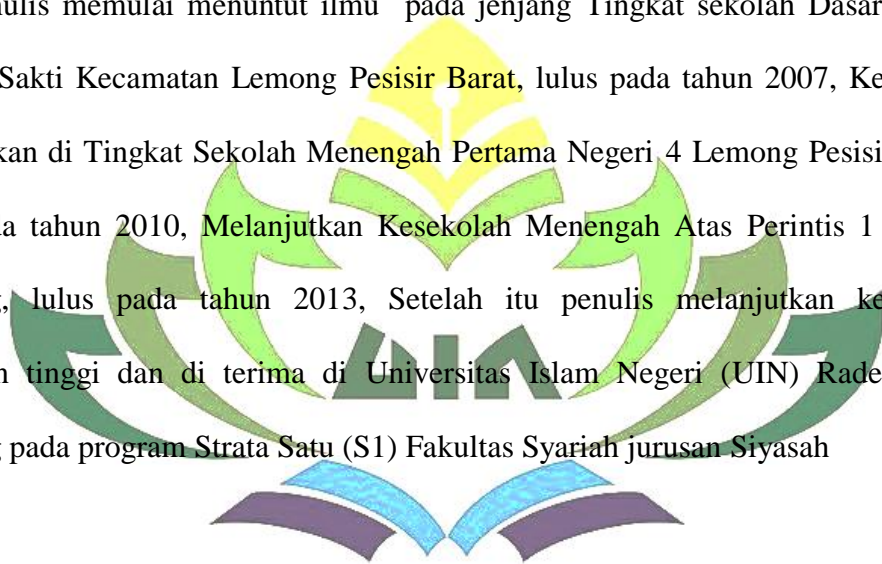
1. Allah SWT yang selalu meridhoi dan mengabulkan segala Do'a
2. Bapak ku tercinta Ahmad Suparlan dan Ibu ku Tersayang Ratina yang sejak aku dilahirkan selalu memberikan yang terbaik kepadaku dalam keadaan apapun, yang selalu mendoakan ku di setiap langkah untuk kesuksesanku, besar harapanku untuk dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan.
3. Kakak ku tercinta Agus Purnomo, Erik Munandar dan Dina Anggraini yang selalu mendoakanku, mendukungku, mengurus kuliahku, menjaga dan melindungiku, serta memberikan motivasi dan inspirasi kepadaku agar selalu bersemangat dalam segala hal. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua.
4. Sanak family yang selalu memberikan semangat dan menanti keberhasilan ku.
5. Alamamater tercinta yang telah mendidik ku menjadi lebih baik yang mampu berfikir lebih maju.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Doni Apriadi yang dilahirkan di Pekon Tanjung pada tanggal 3 April 1994, anak keempat dari empat bersaudara dar pasangan Bapak Ahmad Suparlan dan Ibu Ratina.

Penulis memulai menuntut ilmu pada jenjang Tingkat sekolah Dasar Negeri Tanjung Sakti Kecamatan Lemong Pesisir Barat, lulus pada tahun 2007, Kemudian melanjutkan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lemong Pesisir Barat, lulus pada tahun 2010, Melanjutkan Kesekolah Menengah Atas Perintis 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2013, Setelah itu penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi dan di terima di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah jurusan Siyasah



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada penulis berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Jika bukan karena rahmat dan karunia-Nya, dalam menyelesaikan skripsi berjudul **Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata ( Studi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)** dapat terselesaikan. Dan shalawat beserta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyany nyatanya membumi.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, ucapan terimakasih, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya lah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do'a , mudah-mudahan bantuan yang di berikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan Terimakasih ini penulis berikan kepada :

1. Dr.Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.
2. Dra. Firdaweri, M.H.I. dan Ibu Eti Karini, S.H., M. Hum. masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang banyak telah meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
3. Semua Dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Staff Karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.



5. Sahabat seperjuangan khususnya jurusan Siyasa angkatan 2013 yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari bahwa skripsi masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, terbatasnya ilmu, dan penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin ya rabb

Bandar Lampung, 26

Maret 2018

DONI APRIADI  
Npm: 1321020157

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian .....	14
G. Metode Penelitian .....	14

### **BAB II KONSEP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA MENURUT PANDANGAN FIQIH SIYASAH**

A. Konsep Kebijakan Pariwisata .....	19
B. Pendapatan Asli Daerah Dalam Pariwisata .....	25
C. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Menurut Islam.....	28

D. Pariwisata Menurut Pandangan Fiqih Siyasah .....	48
---	----

### **BAB III PERANAN DAN KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PAD MELALUI PARIWISATA**

A. Gambaran Umum di Kabupaten Pesisir Barat .....	54
B. Kepariwisataaan Kabupaten Pesisir Barat .....	58
C. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat .....	60

### **BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Peran Dan Kontribusi Pemerintah Terhadap Pandapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Alam di Kabupaten Pesisir Barat .....	67
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Alam Di Kabupaten Pesisir Barat .....	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	90

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Judul ini merupakan salah satu bagian penting dan kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya. Demikian juga halnya dengan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari judul.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata ( Studi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung).**

Agar tidak menimbulkan salah pemahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah :

#### **1. Perspektif Hukum Islam**

Perspektif berasal dari bahasa italia "*Prospettiva*" yang berarti gambar pandangan atau sudut pandangan namun menurut Leonardo da Vinci perspektif adalah suatu yang alami yang terbentuk dari *relief* datar menjadi suatu *relief* bidang atau ruang.<sup>2</sup>

Perspektif adalah suatu "cara atau sudut pandang tentang suatu

---

<sup>2</sup> <http://www.notepedia.info/2015/05/pengertian-perspektif-dan-sejarah.html> tgl. 23Juni 2015



peristiwa.”<sup>3</sup>

Pengertian perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Hampir setiap hari orang-orang selalu mengungkapkan perspektif dan sudut pandang mereka mengenai berbagai macam hal. Sebagai contoh, orang yang selalu memberikan sudut pandangnya mengenai sesuatu melalui media sosial, dengan cara memperbaharui statusnya, hingga mengomentari status teman atau saudaranya.

Hukum Islam yaitu suatu kaidah, aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat al-Qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>4</sup>

Hukum Islam adalah syari'at atau hukum-hukum Allah yang ada pada agama Islam itu sendiri untuk mengatur sekaligus menjadi pedoman, baik perintah, larangan, ataupun anjuran untuk melakukan sesuatu pada umatnya dengan berpedoman pada al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para ahli Fuqaha'.

Jadi yang dimaksud dengan perspektif hukum Islam dalam penelitian ini adalah sudut pandang atau ketentuan hukum Islam dalam menyikapi serta

---

<sup>3</sup> G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karina), h.475

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), 575.

menanggapi suatu peristiwa yang didasarkan pada Al-qur'an dan Hadist.

## 2. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 3. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta yang komponen- komponennya terdiri dari : “Pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling; “Wis(man)” yang berarti rumah, properti, kampung, komunitas; dan “ata” berarti pergi terus-menerus, mengembara (*roaming about*) yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti : pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung)

berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan.<sup>5</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

- a. Permasalahan dalam peranan dan kontribusi Pemerintah dalam meningkatkan Pandapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat yang belum optimal.
- b. Persoalan Perspektif hukum Islam tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di fakultas syari'ah jurusan Siyasah
- b. Bahan-bahan yang dibutuhkan penulis tersedia di perpustakaan.
- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan di atas.
- d. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahasnya, khususnya di fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

---

<sup>5</sup> Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisataaan*. (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2003) h.35

### C. Latar Belakang Masalah

Pada zaman dahulu (sebelum Islam datang dan masa awal Islam sampai abad pertengahan) fungsi laut adalah salah satu jalur transportasi yang sangat populer bagi manusia setelah jalur darat, laut memberikan kontribusi yang sangat luas bagi kemakmuran hidup manusia. Ini bisa dimaklumi dikarenakan secara geografis pun komposisi laut jauh lebih besar daripada daratan. Sehingga manusia senantiasa berusaha dengan segala upaya agar mampu memanfaatkan jalur ini untuk kepentingan perdagangan mereka dan juga kepentingan transportasi lainnya.

Pemahaman ini pada akhirnya menghantarkannya pada penyerahan diri, ketundukan dan rasa takut kepada-Nya. Ia adalah termasuk golongan yang berakal, yaitu dalam firman Allah dalam Q.S. Ali Imron 190-191 yang berbunyi.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

“ Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka”. (Q.S. Ali Imron 190-191).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992),



Di banyak ayat dalam Al Qur'an, pernyataan seperti, "Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?", "terdapat tanda-tanda (ayat) bagi orang-orang yang berakal," memberikan penegasan tentang pentingnya memikirkan secara mendalam tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah telah menciptakan beragam ciptaan yang tak terhitung jumlahnya untuk direnungkan. Segala sesuatu yang kita saksikan dan rasakan di langit, di bumi dan segala sesuatu di antara keduanya adalah perwujudan dari kesempurnaan penciptaan oleh Allah, dan oleh karenanya menjadi bahan yang patut untuk direnungkan. Satu ayat berikut memberikan contoh akan nikmat Allah ini.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ  
بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ  
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“ Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”. (Q.S. Al-Baqoroh :2 Ayat 164).<sup>7</sup>

h.98.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h.105.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian dan sebagai penghasil devisa negara kedua setelah minyak bumi dan gas alam. Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan.<sup>8</sup>

Dalam rangka memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan, maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang investasi guna meningkatkan aktivitas pariwisata, yang selanjutnya melalui pengelolaan berbagai potensi secara optimal diharapkan akan dapat menarik dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Pesisir Barat dapat dipastikan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan pada gilirannya akan memberi dampak secara langsung terutama dalam meningkatkan

---

<sup>8</sup> Pendit, Nyoman S, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*.( Jakarta,PT. Pradnya Paramita, 1999) h.64

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan menunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Model pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata daerah yang diusulkan untuk diterapkan dalam pengembangan potensi wisata daerah di Kabupaten Pesisir Barat mengacu pada kondisi aktual saat ini berupa potensi dan masalah wisata. Untuk mengembangkan wisata terdapat berbagai *stakeholders* yang terlibat (pemerintah, lembaga non pemerintah), SDM, program-program, dana dan fasilitas. Berdasarkan keterlibatan *stakeholders* dan berdasarkan kondisi saat ini didapatkan program-program yang diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas di dalam upaya pengembangan daerah tujuan wisata di Kabupaten Pesisir Barat kedepannya.

Sasaran tersebut di atas dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata sehingga diperlukan peran serta dan dukungan dari masyarakat, pemerintah dan seluruh sektor yang berperan dalam pengembangan kepariwisataan. Keberhasilan pelaksanaan pengembangan daerah tujuan wisata sangat tergantung dan tidak terlepas dari peran semua elemen, tentunya dengan memperhatikan unsur program, anggaran dan proses yang ada.<sup>9</sup>

Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan 3 segi yakni

---

<sup>9</sup> Wahab, Salah. *Manajemen Kepariwisataaan*. (Jakarta, Pradnya Paramita, 2003)h.124.

- a. segi ekonomis (devisa, pajak-pajak),
- b. segi kerjasama antar Kabupaten kota.
- c. Pesisir Barat diarahkan sebagai sektor yang dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan PAD, pemberdayaan masyarakat sekitar, untuk memperluas kesempatan kerja, dan memasarkan produk-produk budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kawasan wisata harus terencana. Bertahap secara menyeluruh untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat.<sup>10</sup> Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata;
- b. mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar; dan
- d. menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam

---

<sup>10</sup> Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*. (Jakarta: Grasindo, 2009) h.97



institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan (*accountable*).<sup>11</sup>

Demikianlah pandangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, bahwa pengembangan pariwisata Indonesia harus didahului dengan pemahaman mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan pariwisata di Indonesia. Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan tentang Pembangunan Kepariwisataan (Pasal 6: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, Pasal 8: 1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/kota. 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.) serta UU No 10

---

<sup>11</sup> Andi Sammeng Mappi, *Cakrawala Pariwisata*. (Jakarta : Balai Pustaka 2001) h.93

tahun 2009 tentang Kawasan Strategis (Pasal 12: 1) Aspek- aspek penetapan kawasan strategis pariwisata).<sup>12</sup>

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai banyak tempat wisata yang sangat potensial jika dikembangkan dengan baik, dan sudah berjalan selama ini ada 12 pariwisata yang dikontrol pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yaitu Pulau Pisang, Pantai Tanjung Setia, Labuhan Jukung, Pantai Wayjambu, Pantai Nyimbor, Pantai Mandiri, Goa Matu, Penangkaran Penyu, Kebun Damar, Ekowisata Pemerihan, Rino Camp Sukaraja Atas Dan Pantai Melasti. Dari keseluruhan pariwisata yang ada di Pesisir Barat itu merupakan pendapatan anggaran daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat semenjak pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat.

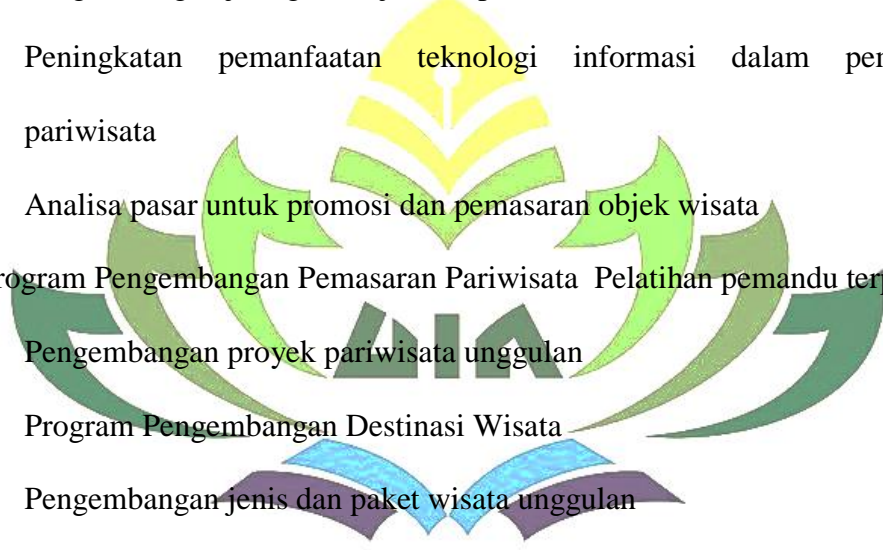
Pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) saat ini dalam tahap Pelaksanaan program pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, beberapa tahun terakhir ini sangat dimaksimalkan, cara merupakan suatu langkah maju untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mendukung semua program pariwisata khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diketahui bahwa Disbudpar saat ini mempunyai beberapa program antara lain:

1. Pengembangan statistik kepariwisataan

---

<sup>12</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006),h.91

- 
- a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
  - b. Pelaksanaan promosi pariwisata daerah di dalam dan luar negeri
  - c. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
  - d. Pengembangan jaringan kerjasama promosi wisata
  - e. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
  - f. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata
2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelatihan pemandu terpadu
- a. Pengembangan proyek pariwisata unggulan
  - b. Program Pengembangan Destinasi Wisata
  - c. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
  - d. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
  - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran
  - f. Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga dunia usaha
  - g. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta standarnisasi kepariwisatan
  - h. Pengembangan daerah tujuan pariwisata

Kebudayaan di Pesisir Barat yang dapat memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pariwisata dan kebudayaan sebagai tempat wisata domestik dan internasional. Meskipun Pesisir Barat memiliki sejumlah potensi alam dan budaya yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap secara maksimal. Banyak pengelolaan wisata alam dan budaya di Pesisir Barat dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata di berbagai tempat objek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat.

Kabupaten Pesisir Barat memiliki berbagai macam objek wisata alam dan wisata budaya yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dengan tepat maka akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung maka akan secara langsung akan meningkatkan PAD.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan dan kontribusi Pemerintah dalam meningkatkan Pandapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat?



#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan dan kontribusi Pemerintah dalam meningkatkan Pandapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi pariwisata secara umum, dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan mengenai pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

#### **E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),<sup>13</sup> yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan, yang dalam hal

---

<sup>13</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Cet Ke-7, Bandung: MandarMaju, 1986), h.81.

ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir Barat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Ciri khas penelitian ini tidak dapat disahkan dengan pengamatan yang berperan serta, sebab peranlah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Pengamatan berperan serta adalah sebagai pengamatan yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek dan selama ini data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa adanya gangguan. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, berpartisipasi penuh sekaligus pengumpul data sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

Sifat penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.<sup>14</sup>

#### 1. Sumber Data

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau persoalan yang berhubungan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000),h. 40.

a) Data *primer* adalah data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti, dengan memaknai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara) kepada Kadin Pariwisata serta Kabid Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, serta melakukan observasi (pengamatan langsung terhadap penelitian).

b) Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi dan diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip resmi, serta *literature* lainnya yang relevan dalam melengkapi data *primer* penelitian.<sup>15</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Penelitian Lapangan, dengan cara wawancara/*interview* dengan orang-orang yang berhubungan dengan bidang yang diteliti.

b) *Library research*, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.<sup>16</sup>

## 3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian,

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h.45.

<sup>16</sup> Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.129.

keserasian satu sama lainnya.<sup>17</sup>

b. *Organising*, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.

c. Penemuan hasil riset, menganalisa data hasil dari organising dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis yang akan digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggambarkan atau menjelaskan data yang diteliti atau didapatkan dari lapangan kemudian dilakukan proses editing, klasifikasi data, tabulasi data, dan interpretasi data yang kemudian menjadi kesimpulan untuk menjawab masalah yang akan diteliti.

#### 5. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang atau masyarakat yang berperilaku yang diamati.<sup>18</sup> Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan

---

<sup>17</sup> *bid*, 127.

<sup>18</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h.3.

hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan kerangka berfikir sebagai induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>19</sup> Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisis, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Dalam analisis data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

---

<sup>19</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid I* (Yogyakarta : FakultasPsikologi UGM 1983) h.80.

## BAB II

### KONSEP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA MENURUT PANDANGAN FIQIH SIYASAH

#### E. Konsep Kebijakan Pariwisata

Bila dilihat dari segi etimologis pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali. Pariwisata menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 6 tahun 2011 tentang Kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisatadan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, dan Pemerintah Daerah.

*The Association Internationale des Experts Scientifique du Tourisme* (AIEST) mendefenisikan pariwisata sebagai keseluruhan hubungan dan fenomena yang timbul akibat perjalanan dan pertinggalan (*stay*) para pendatang namun yang dimaksud pertinggalan bukan berarti untuk bermukim tetap.<sup>20</sup>

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain bersifat sementara. Dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Selanjutnya Burkart dan Medlik dalam Bram

---

<sup>20</sup> Suwarjoko, Warpani & Warpani P. Indira. *Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah*. Bandung : ITB. 2007, h.59



menjelaskan pariwisata sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuan- tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.<sup>21</sup>

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor- sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri.

Hukum Islam dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kultur pemerintahan Di-era otonomi daerah kepedulian terhadap perlindungan dalam pengelolaan lingkungan menjadi sangat berkurang karena kepentingan ekonomi (peningkatan PAD) lebih dominan dari kepentingan perlindungan lingkungan. Salah satu penyebab hal ini adalah pandangan antroposentris dan kapitalis yang menganggap manusia sebagai penguasa alam, sehingga alam dieksploitasi untuk kepentingan hidupnya. Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam (*deep ecology*) yang mempunyai peran dan posisi khusus sebagai *khalifah*, pelindung dan pengelola alam dengan penuh tanggung jawab. Pemerintahan daerah yang menjalankan prinsip-prinsip *deep*

---

<sup>21</sup> Kodyat, RA. *Statistik Induktif Terapan*. Yogyakarta: BPFE UGM. 2001, h.37

*ecology* sebagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan mampu mewujudkan keadilan ekologi.<sup>22</sup>

Kebijakan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Sehingga Kebijakan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan Kebijakan pariwisata.<sup>23</sup>

Sedangkan terkait pariwisata yaitu sejak 6 Agustus 1969 dari awal pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden R.I No.9 Tahun 1969 dimana dalam BAB II pasal 3 disebutkan bahwa usaha-usaha Kebijakan pariwisata di Indonesia bersifat suatu Kebijakan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha Kebijakan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara.

Sesuai dengan instruksi presiden tersebut, dikatakan pula bahwa tujuan Kebijakan pariwisata di Indonesia adalah :

- a. Meningkatkan pendapatan devisa negara pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan kerja serta

---

<sup>22</sup> Nita Triana, *Membangun Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pemerintahan Daerah (Perspektif Hukum Islam)* Bandar Lampung : 2014 h. 58

<sup>23</sup> Pitana, I gededanPutu G. *Sosiologipariwisata*.CV Andi Offset. Yogyakarta, 2005.h. 15

mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.

b. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.

c. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata pasal 11 yang menjadi acuan dalam Kebijakan kawasan pariwisata didasarkan pada kriteria:

- 
- a. Aksesibilitas
  - b. Amenitas/fasilitas
  - c. Ancillary/kelembagaan Dayatarik wisata
  - d. Kesiapan masyarakat
  - e. Era/trend yang berkembang

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang Kebijakan pariwisata di daerah tujuan wisata meliputi :

- a. Obyek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada:

- a) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.

- b) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- c) Adanya spesifikasi/ciri khusus yang bersifat langka.
- d) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan;
- e) Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain-lain).
- f) Obyek wisata budaya dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

b. Prasarana Wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

c. Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.<sup>24</sup>

Manajemen sebagai suatu teknik, maksud dan tujuan dari sekelompok

---

<sup>24</sup> Syamsurizal. *Peluang di Bidang Pariwisata*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2007.h.97

manusia tertentu yang ditetapkan, dijelaskan dan dijalankan. Pengelolaan atau manajemen didefinisikan sebagai berikut :

1. Proses, cara, perbuatan mengelola,
2. Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain,
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi,
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>25</sup>

Pengelolaan (*management*) merupakan sebuah proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>26</sup>

Manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas *human and national resources* (terutama *human resources*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Perencanaan (*Planinng*) adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h.53

<sup>26</sup> Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009, h.124

- kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki
2. Pengorganisasian (*Organizing*), adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.
  3. Pelaksanaan (*Actuating*), adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.
  4. Pengawasan (*Controlling*), adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.<sup>27</sup>

#### **F. Pendapatan Asli Daerah Dalam Pariwisata**

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, maka sumber pendapatan daerah untuk membiayai APBD terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Selanjutnya di dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

---

<sup>27</sup> *Ibid* h.125



undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang Kebijakan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

#### 1. Pajak daerah

Menurut Siagian, dalam bukunya yang berjudul Pajak Daerah Sebagai Keuangan Daerah, pajak daerah dapat didefinisikan sebagai pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomer 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah yang tergolong di dalamnya yaitu :

- a. Pajak reklame
- b. Pajak penerangan jalan
- c. Pajak galian C
- d. Pajak hotel dan restoran

e. Pajak hiburan Tunggal

f. pajak daerah

Yang tergolong dalam pos bagi hasil pajak :

a. Pajak bumi dan bangunan

b. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

c. Pajak kendaraan bermotor

d. Bea perolehan atas tanah dan bangunan

e. Bea balik nama kendaraan bermotor

## 2. Retribusi daerah

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Nama, objek dan subjek retribusi adalah :

a. Nama retribusi :

a) Retribusi karcis tanda masuk objek wisata yaitu : pungutan yang dipungut kepada pengunjung objek wisata sebagai tanda bukti pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah.

b) Retribusi izin usaha pariwisata yaitu : kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian, dan pengawas atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Objek retribusi terdiri dari :

a) Pelayanan jasa umum untuk memasuki objek wisata Penerbitan surat izin usaha pariwisata

b) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan dan menikmati pelayanan jasa umum dan perizinan tertentu. c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan b. Jasa giro c. Pendapatan bunga d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing e. Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

## **G. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Menurut Islam**

### **1. Kebijakan Pemerintah**

Pesisir Barat memiliki potensi pariwisata yang begitu beragam, baik dari sisi produk wisata maupun pasar wisatawan. Dengan alam dan budaya

yang dimiliki, Pesisir Barat menawarkan berbagai daya tarik wisata. Potensi pasar wisatawan Pesisir Barat juga tidak kalah besarnya. Keterkenalan pariwisata Pesisir Barat dengan budaya yang unik dan khas dan panorama alam yang indah sejak tahun 90-an telah dikenal di tingkat regional, nasional maupun mancanegara. Keunikan dan nilai sejarah dan budaya yang tinggi sehingga ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) Pantai Tanjung Setia ditetapkan sebagai tujuan liburan wisatawan mancanegara, menjadikan Pesisir Barat kaya akan sumber pasar wisatawan. Sebaran Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Pesisir Barat layak suatu objek wisata dapat dikembangkan apabila memiliki daya Tarik.

Kawasan pesisir yang ada di Provinsi Lampung yang memiliki potensi pariwisata yang besar diantaranya yaitu dari sektor bahari, religi, ekowisata dan event wisata. Kawasan wisata Kabupaten Pesisir Barat selain tercantum sebagai salah satu wisata unggulan Provinsi Lampung dalam Rencana Induk Kebijakan Pariwisata (RIPP) Provinsi Lampung 2012-2031, dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 11 tentang Kepariwisata, beberapa obyek wisata di Kabupaten Pesisir Barat juga merupakan salah satu kawasan strategis dari beberapa kawasan pariwisata di Provinsi Lampung yang menjadi prioritas untuk dikembangkan, dengan mengunggulkan wisata bahari sebagai daya tarik wisatanya, dimana sebagian besar kawasan wisata Pesisir Barat yaitu wisata bahari.

Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak pantai dengan jenis ombak yang berkualitas internasional sehingga sering dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang suka berselancar, tetapi disayangkan saat ini pariwisata di wilayah Pesisir Barat masih berkembang secara alami dan minim perhatian pemerintah, seperti di beberapa obyek wisata di Kabupaten Pesisir Barat, contohnya obyek wisata bahari di Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong yang memiliki potensi pariwisata namun belum ada tersedia sarana maupun prasarana oleh pemerintah setempat, akan tetapi ada juga beberapa kawasan pariwisata yang sudah mulai dikembangkan dan diberi fasilitas baik sarana dan prasarana yang sudah terbilang baik, kawasan pariwisata itu diantaranya kawasan wisata Labuhan Jukung di Kecamatan Pesisir Tengah, Pantai Tanjung Setia di Kecamatan Pesisir Selatan dan Pantai Karang Nyimbor di Kecamatan Pesisir Selatan. Kawasan pariwisata berikut wisatawan bisa merasakan fasilitas yang tersedia mulai dari penginapan, sarana hiburan, kuliner (makanan), keberihan dan kemudahan akses menuju ke kawasan pariwisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat tengah mengupayakan beberapa langkah strategis Kebijakan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, rencana ini kemudian dituangkan ke dalam Rencana Induk Kebijakan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat. Adapun pokok dari RIPPDA Kabupaten Pesisir Barat adalah mengembangkan pariwisata berbasis

wisata alam dan budaya dengan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya yang dilakukan melalui peningkatan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial, Kebijakan obyek wisata potensial dengan meningkatkan aspek pemasaran pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara; Kebijakan kapasitas masyarakat dalam mendukung Kebijakan kawasan pariwisata yang bertumpu pada pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dan peningkatan infrastruktur pendukung bagi Kebijakan kawasan pariwisata potensial.

## **2. Kebijakan Pariwisata**

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Barat, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2011, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebagai SKPD yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan teknis, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata, pengelolaan ketatausahaan Dinas, pelaksanaan tugas lain di bidang kebudayaan, pariwisata yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pernyataan Visi dan Misi Berdasarkan latar belakang dan landasan pemikiran yang telah dikemukakan, maka telah tergambar keinginan dalam



pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang merupakan berbagai dasar pemikiran yang dirumuskan sebagai rambu-rambu didalam Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Barat pada masa mendatang yang penuh dengan harapan dan tantangan, dimana harus dipedomani oleh insan kebudayaan dan kepariwisataan untuk lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terencana dan berkesinambungan. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merumuskan Visi sebagai berikut: “Terwujudnya daerah wisata budaya dengan kreatifitas pengelolaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.”

Dalam mengimplementasikan visi pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan tersebut diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan, akuntabel dan mengutamakan kepentingan masyarakat, yang mempunyai misi sebagai berikut adalah:

1. Melakukan pelestarian dan Kebijakan kebudayaan yang berlandaskan nilai luhur.
2. Mendukung Kebijakan destinasi dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing global.
3. Melakukan Kebijakan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.
4. Menciptakan ketatalaksanaan yang bersih dan akuntabel serta layanan

publik yang ramah.

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai banyak tempat wisata yang sangat potensial jika di kembangkan dengan baik, dan sudah berjalan selama ini ada 12 pariwisata yang dikontrol pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yaitu

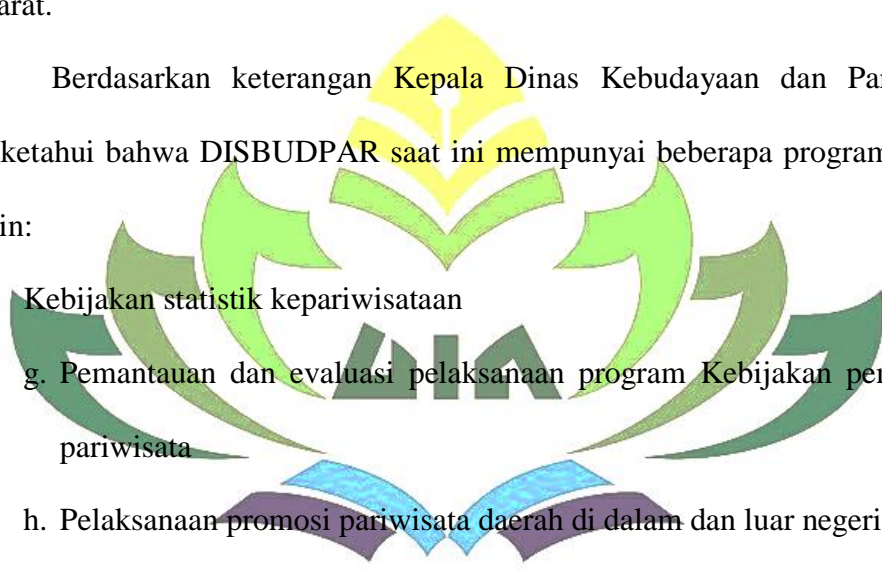
1. Pulau Pisang
2. Pantai Tanjung Setia
3. Labuhan Jukung
4. Pantai Wayjambu
5. Pantai Nyimbor
6. Pantai Mandiri
7. Goa Matu
8. Penangkaran Penyu
9. Kebun Damar
10. Ekowisata Pemerihan
11. Rino Camp Sukaraja Atas
12. Pantai Melasti.

Dari keseluruhan pariwisata yang ada di pesisir barat itu merupakan pendapatan anggaran daerah (PAD) kabupaten pesisir barat semenjak pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) saat ini dalam tahap Pelaksanaan program Kebijakan objek



wisata yang ada di kabupaten Pesisir Barat, beberapa tahun terakhir ini sangat dimaksimalkan, cara merupakan suatu langkah maju untuk meningkatkan pariwisata di kabupaten Pesisir Barat dan untuk mendukung semua program pariwisata khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diketahui bahwa DISBUDPAR saat ini mempunyai beberapa program antara lain:

- 
- The watermark logo of Kabupaten Pesisir Barat is a stylized emblem. It features a central yellow diamond shape with a white outline, resembling a flower or a sun. Below this, there are green curved lines forming a bowl-like shape. At the bottom, there are blue and purple curved lines. The word 'PESISIR BARAT' is written in a stylized font across the middle of the logo.
3. Kebijakan statistik kepariwisataan
    - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kebijakan pemasaran pariwisata
    - h. Pelaksanaan promosi pariwisata daerah di dalam dan luar negeri
    - i. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
    - j. Kebijakan jaringan kerjasama promosi wisata
    - k. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
    - l. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata
  4. Program Kebijakan Pemasaran Pariwisata
    - i. Kebijakan proyek pariwisata unggulan
    - j. Program Pengembangan Destinasi Wisata
    - k. Kebijakan jenis dan paket wisata unggulan

- l. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- m. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kebijakan destinasi pemasaran
- n. Pelaksanan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga dunia usaha
- o. Kebijakan, sosialisasi dan penerapan serta standarnisasi kepariwisatan
- p. Kebijakan daerah tujuan wisata

Kebudayaan di Pesisir Barat yang dapat memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pariwisata dan kebudayaan sebagai tempat wisata domestik dan internasional. Meskipun Pesisir Barat memiliki sejumlah potensi alam dan budaya yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap secara maksimal. Banyak pengelolaan wisata alam dan budaya di Pesisir Barat dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata di berbagai tempat objek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat.

Kabupaten Pesisir Barat memiliki berbagai macam objek wisata alam dan wisata budaya yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dengan tepat maka akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung maka akan secara langsung akan meningkatkan PAD.

Melakukan pembinaan dan kerjasama Kebijakan seni budaya dan kerajinan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Tujuan Berdasarkan visi dan misi maka ditetapkan tujuan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan tahun 2010 - 2016 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas masyarakat yang berbudi pekerti luhur beserta hasil karyanya.
2. Meningkatnya kemandirian dan daya saing dalam perekonomian daerah.
3. Meningkatnya pemerataan pembangunan objek wisata pada setiap wilayah.
4. Meningkatnya perlindungan, pelestarian dan Kebijakan keragaman budaya Pesisir Barat dengan produk pariwisata yang inovatif.

Meningkatnya persatuan dan cinta tanah air serta kerjasama provinsi dan nasional dalam bidang Kebijakan kebudayaan dan pariwisata Pesisir Barat.

### **3. Kebijakan Kepariwisata Menurut Islam**

Seruan Islam untuk melakukan perjalanan pariwisata lebih luas dari tujuan yang dewasa ini diungkapkan dalam masalah kepariwisataan. Dalam Islam kita mengenal istilah hijrah, haji, ziarah, perdagangan, dan mencari ilmu pengetahuan yang merupakan diantara faktor yang dijadikan alasan Islam untuk mendorong umatnya melakukan perjalanan. Keberhasilan manusia dalam mencapai kemajuan di bidang ilmu, teknologi, komunikasi, dan transportasi, telah memberi kemudahan dalam melakukan perjalanan wisata. Dengan demikian kebiasaan melakukan perjalanan wisata memiliki peran yang besar dalam kehidupan suatu komunitas bangsa. Hijrah merupakan

perjalanan ibadah dan politis dalam Islam.

Hijrah bisa berupa perjalanan dari satu kota ke kota lain, atau dari negara ke negara lain, atau dari dirinya sendiri untuk menuju Allah Swt untuk perubahan kearah kebaikan. Hijrah biasanya memiliki dua tujuan, yaitu menyebarkan agama Islam atau keluar dari komunitas yang tidak kondusif dan dari wilayah kekuasaan sebuah pemerintahan yang kejam . Islam dengan konsep hijrahnya menyerukan kaum muslimin agar ketika kondisi hidupnya tidak memberi kesempatan baginya untuk berkembang dan maju, mereka harus berhijrah ke negeri lain dan membebaskan dirinya dari tekanan pemerintahan yang kejam. Hal ini ditegaskan dalam Qs. Annisa' (4) : 100.

❖ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ تُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا

Artinya : Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Annisa' (4) : 100).

Demikian pula, haji dan ziarah merupakan bentuk perjalanan wisata dalam Islam yang penuh nilai-nilai maknawi. Kaum muslimin pada waktu-waktu yang telah ditentukan melakukan perjalanan meninggalkan tanah air



menuju tanah suci. Di sini, kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia bertemu dan terjadilah komunikasi dan pengenalan terhadap berbagai budaya kaum muslimin di dunia. Seruan untuk melakukan perjalanan haji ini Allah firmankan dalam Qs. Ali Imran (3) : 97.

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. ( Qs. Ali Imran (3) : 97)

Sementara itu, perjalanan wisata ziarah, dilakukan untuk mengunjungi berbagai tempat suci di dunia, seperti mengunjungi tiga masjid Masjid al-Haram Makkah, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa di Palestina, Ziarah ke Maqam Rasulullah dan para sahabat serta maqam Baqi' dan tempat-tempat bersejarah dibelahan dunia Islam lainnya. Wisata ziarah akan memberikan pengaruh besar dalam jiwa manusia. Manusia akan terkenang pada kehidupan Rasulullah SAW dan keluarga suci beliau. Said Quthub berkomentar tentang anjuran dan hikmah wisata ziarah : "Dengan cara ini, mereka akan terdorong untuk meneladani kehidupan para manusia suci itu dan selalu berusaha untuk

mencapai tingkat manusia yang sempurna atau insan kamil”,<sup>28</sup> sebagaimana firman Allah dalam Qs. Arrum (30) : 9.

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya : dan Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri. (Qs. Arrum (30) : 9)

Beberapa tujuan Pariwisata menurut Al-Quran dan

Sunnah dalam Al-Quran banyak dijelaskan tujuan berwisata, diantara tujuan-tujuan tersebut adalah :

1. Mengenal Sang Pencipta dan Meningkatkan Nilai Spiritual

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama, adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah swt menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam. Dalam

<sup>28</sup> Said Quthub, *Fizhila Li al-Quran*, (Dar Syuruq, Cairo, 2001 M),juz 5 hal 28.

Qs. Ankabut (29) : 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ  
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Qs. Ankabut (29) : 20)

2. Berbisnis, membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah

Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan pujian kepada usaha perkonomian yang sehat, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Quraaisy (106) : 1 -4

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الْشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ  
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٣﴾

Artinya : karena kebiasaan orang-orang Quraaisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

(Qs. Quraissy (106) : 1 -4).<sup>29</sup>

Pemberian motivasi seperti ini telah membuat kaum muslimin melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk berdagang mencari penghasilan, Yang menarik dari fenomena ini adalah bahwa melalui kegiatan perjalanan dagang ini pula Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Maka potensi-potensi daerah dalam menumbuhkan geliat usaha ekonomi masyarakat dikembangkan melalui program Pemerintah Daerah, dengan meningkatkan usaha kecil dan menengah serta membangun pusat-pusat industri yang layak dan cocok dengan Kebijakan daerah.

### 3. Menambah Wawasan

Keilmuan Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam Qs. Ali Imran (3) : 137,

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾

Artinya : Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah

---

<sup>29</sup> Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al-Fida' Ismail, *Tafsir al-Quran alKarim*, (Dar Maktabah al-Hilal, Beirut, cet 1, 1986 M), hal 554.

Allah[230]; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

Semua ini dimaksudkan Allah agar dijadikan pelajaran oleh umat-umat berikutnya.”<sup>30</sup> Salah satu cara Pemerintah Daerah mengundang tamu dari luar untuk memilih pendidikan dasar, menengah, atau bahkan perguruan tinggi adalah dengan membangun pusat pendidikan terpadu, memfokuskan kota pendidikan yang berstandar Nasional dan Internasional, jika ini terwujud secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat dan sikap intelektual dan perilaku positif dari individu masyarakat.

#### 4. Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati.

Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini semua akan

---

<sup>30</sup> Jamaluddin al-Qasimin, *Mahasin al-Ta'wil*, (Maktabah al-Halabi, Cairo, tanpa tahun), hal 36.

menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan iman kepada sang khaliq.

Sebab dalam Islam sesuatu dinilai baik (sesuai dengan prinsip Islam) apabila :

1. Mengikuti atau sesuai dengan apa yang diatur oleh AlQur'an dan Sunnah.
2. Sesuatu atau perbuatan yang secara tekstual tidak diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Pengelolaan pariwisata dalam konteks dunia modern pada hari ini kiranya dapat memadukan atau mengkombinasikan antara penerapan manajemen modern dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan batasan-batasan :

1. Tujuannya diarahkan untuk memperkuat iman dan memupuk akhlak.
2. Penyelenggaraannya tidak mempraktekkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral.
3. Objek yang disuguhkan adalah kekayaan alam atau budaya yang mubah dan halal untuk diperlihatkan.
4. Sarana dan prasarana pariwisata dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah.



5. Pengelolaan objek-objek wisata seharusnya tidak merubah apalagi merusak fungsi-fungsi alam dan ekosistem yang ada.

Oleh karena itu menjadikan pariwisata sebagai sebuah usaha peningkatan ekonomi masyarakat atau sebagai salah satu penyumbang bagi pendapatan asli daerah diperbolehkan oleh Islam selama tidak melanggar batas halal-haram, maka semua komponen mulai dari pihak Pemerintah hingga lapisan masyarakat mesti memahami etika berwisata yang antara lain meliputi :

1. Aktivitas bisnis (*muamalah madhiyah*) dalam mengelola objek pariwisata tidak dibenarkan menjalankan bisnis, objek wisata yang terdapat unsur judi (*maisir*), riba, dan *gharar* dan bisnis yang dilarang lainnya.
2. Menyediakan fasilitas publik, sehingga kenyamanan wisatawan terjamin sedemikian rupa. Dengan demikian wisatawan tidak merasa takut dan khawatir meninggalkan kewajiban seperti sholat atau merasa takut terpaksa melanggar larangan seperti makanan yang tidak jelas haram-halalnya.
3. Objek wisata yang ditawarkan adalah objek yang boleh dan layak untuk disaksikan.
4. Pengelolaannya dikaitkan dengan kepentingan dakwah seperti peringatan atau himbauan yang religius pada tempat-tempat tertentu

atau membuat brosur-brosur yang berisi penjelasan yang bernuansa agama.

Pengelolaan Pariwisata yang Islami Sebagaimana yang dijelaskan di atas, menciptakan bentuk pariwisata yang Islami pada prinsipnya harus ada kesesuaian praktek-praktek pariwisata dengan aturan-aturan ajaran Islam. Sektor Pariwisata sebagai sebuah mu'amalah pada dasarnya dibolehkan sepanjang tidak ada praktek-praktek yang terlarang di dalamnya.

Sebagai sebuah mu'amalah yang *mubah* (dibolehkan) maka sektor pariwisata sangat terbuka untuk dikembangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga diharapkan pariwisata dapat menjadi media penumbuhan kesadaran, keimanan dan ketaqwaan serta mencapai nilai-nilai kehidupan yang luhur dan tinggi. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan perhatian yang proporsional dalam hubungan agama dan kepariwisataan. Dan hal ini merupakan keharusan bagi Indonesia yang mempunyai filsafat hidup berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka pengelolaan pariwisata yang Islami perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

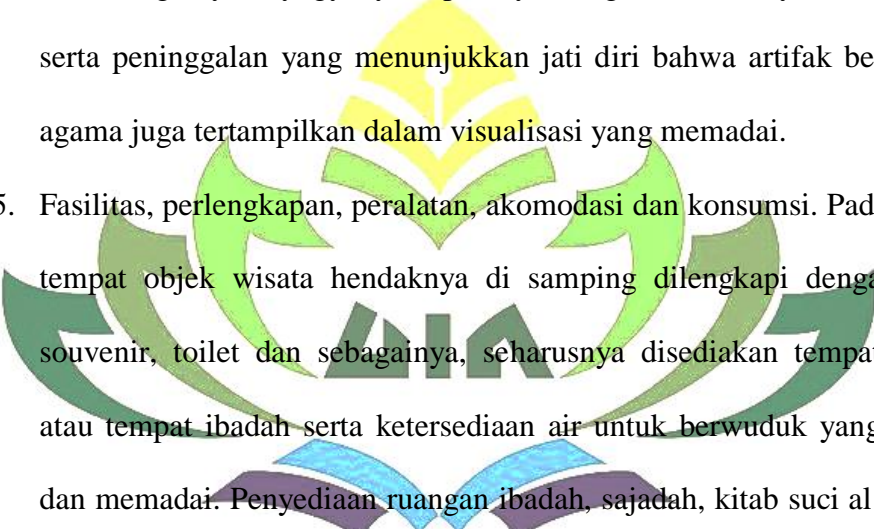
1. Nilai-nilai luhur agama menjadi amat penting sebagai motivator dan sumber nilai ideal dalam Kebijakan kepariwisataan. Tentu saja

diperlukan suatu pendekatan persuasif, interaktif, komunikatif dan produktif antara pelaku dunia wisata seperti Dinas Pariwisata dan pemimpin formal dan informal di tingkat paling strategis. Termasuk ke dalamnya semua warga masyarakat harus digesa untuk memahami kepariwisataan yang ideal. Lebih-lebih lagi di dalam Islam, semua aktifitas yang baik dan mengandung nilai-nilai positif serta dilaksanakan dengan cara yang baik, selalu bernilai ibadah. Yang diperlukan bagi para ulama dan tokoh masyarakat adalah suatu pemahaman bahwa dunia wisata adalah bagian dari kebutuhan jasmani dan ruhani manusia yang terbimbing ke arah yang baik dan benar, terjauh dari yang berbau maksiat. Simbol-simbol kepariwisataan di antaranya dibolehkannya atau bahkan dibiasakannya petugas hotel dan wisata memakai busana muslim dan muslimah, tentu saja akan membuat warga umat Islam umumnya dan masyarakat sekitar pada khususnya, terjauh dari prasangka buruk. Dunia perhotelan haruslah dijauhi dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan budaya Islami. Selanjutnya diperlukan pengaturan tamu hotel yang harus benar-benar dijauhkan dari penggunaan obat terlarang dan sejalan dengan pencegahan praktek-praktek pergaulan bebas lintas kelamin yang tidak syah. Ini semua secara implisit merupakan bentuk ideal kemaslahatan yang menunjang kepariwisataan. Begitu pula pertunjukan yang disajikan seniman atau pelaku seni pada dunia wisata

ditampilkan dalam batas-batas kewajaran dengan memperhatikan nilai adat dan agama.

2. Nilai-nilai ideal Islam tentang disiplin, kebersihan, kesantunan, kesabaran, keikhlasan dapat pula hendaknya menjadi rujukan bagi masyarakat pelaku dunia wisata dan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan itu komponen umat yang senantiasa terjun ke masyarakat seperti da'i atau mubbaligh dan muballighah, jama'ah pengajian, majelis ta'lim dan lainnya dapat diberdayakan pula untuk mengajak masyarakat luas menggunakan fasilitas wisata seperti toilet umum fasilitas umum dan objek wisata sebagai sesuatu yang mesti dipelihara kerapihan, kebersihan dan kenyamanannya secara bersama-sama dan untuk kemaslahatan (kebaikan) bersama.

3. Para pekerja sektor wisata seperti sopir angkutan wisata, interpretor, pemandu wisata, travel agent, tour leader (pimpinan perjalanan) dan pramuwisata lainnya pada dasarnya merupakan representasi pencerminan apakah agama berKebijakan terhadap Kebijakan wisata yang ideal. Apabila mereka menjalankan tugasnya secara baik, etis atau berakhlakul karimah, dan bagi yang beragama (Islam) menjalankan ibadahnya serta menyediakan waktu pula bagi peserta wisata menjalankan ibadah mereka, maka otomatis mereka bekerja sambil beribadah.

- 
4. Objek wisata yang memberikan dampak nilai-nilai spiritual yang biasa disebut wisata ziarah atau wisata budaya diharapkan semakin diperkaya di samping objek lainnya. Begitu pula item-item dan pajangan bernilai sejarah, kultural, dan bernuansa religi yang terdapat di museum, gallery dan sebagainya seyogyanya diperkaya dengan hasil karya dan produk serta peninggalan yang menunjukkan jati diri bahwa artifak bernuansa agama juga tertampilkan dalam visualisasi yang memadai.
  5. Fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi. Pada setiap tempat objek wisata hendaknya di samping dilengkapi dengan toko souvenir, toilet dan sebagainya, seharusnya disediakan tempat sholat atau tempat ibadah serta ketersediaan air untuk berwuduk yang bersih dan memadai. Penyediaan ruangan ibadah, sajadah, kitab suci al-Qur'an di laci meja atau fasilitas ibadah di dalam kamar atau di ruangan lain seperti mushalla dan masjid di dalam kompleks perhotelan, amatlah penting dan komplementer. Lebih dari itu, makanan dan minuman yang disajikan terutama untuk wisatawan lokal dan domestik, harus dijamin kehalalannya.

#### **H. Pariwisata Menurut Pandangan Fiqih Siyasah**

Kata *siyasah* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin

dan memerintah”.<sup>31</sup> Di samping arti tersebut kata *siyasah* juga berarti “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata *sasa* bersinonim dengan kata *dabbara* (mengatur), *to lead* (memimpin), *to govern* (memerintah), dan *policy of government* (kebijakan pemerintah).<sup>32</sup>

Islam datang untuk merubah banyak pemahaman keliru yang dibawa oleh akal manusia yang pendek, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai dan akhlak yang mulia. Wisata dalam pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan upaya menyiksa diri dan mengharuskannya untuk berjalan di muka bumi, serta membuat badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam dunianya. Islam datang untuk menghapuskan pemahaman negatif yang berlawanan dengan (makna) wisata.

Di samping itu, pariwisata ternyata juga berperan di dalam mengembangkan semangat, rasa dan kesadaran keberagamaan (religousness) manusia. Bahkan wisata di dalam Islam seperti telah disiinggung di atas merupakan bagian tak terpisahkan dengan ibadah seperti ibadah haji yang melakukan prosesi dan safari suci Makkkah, Arafah, Muzdalifah, Mina dan kembali ke Mekkah. Ziarah ke kota dan masjid nabawi di Madinah dan tempat-tempat bersejarah lainnya di sekitar Mekkah dan Madinah. Bahkan sekarang berkembang wisata ibadah umrah plus mengunjungi berbagai tempat bersejarah di negara-negara Timur Tengah. Tentu saja wisata agama ini bukan hanya milik

---

<sup>31</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi tematis dunia Islam*, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, jilid 3. t.t. h. 192

<sup>32</sup> *Ibid* h. 192



Islam, bahkan hampir semua agama memiliki wisata jenis ini dengan segala variasinya menurut kepercayaan dan sosial budaya mereka.

Di dalam al-Quran diperoleh banyak isyarat untuk melakukan aktivitas pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang bisa mendatangkan pendapatan individu, masyarakat dan *income* bagi negara. Bahkan ada beberapa daerah atau negara roda perekonomiannya sangat tergantung pada sektor pariwisata yang dapat menghasilkan *income* yang banyak. Misalnya daerah yang memiliki letak geografis yang indah, keragaman seni dan budaya, sarana dan prasarana transportasi dan akomodasi, khazanah peninggalan sejarah yang kaya, maka pariwisata sebagai objek industri sangat menjanjikan dikembangkan. Yang telah di jelaskan dalam A-Qur'an.

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : dan Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian mengulanginya (kembali). Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. A-Ankabut Ayat : 19-20)

Di dalam surat al-‘Ankabut ayat 19-20 menegaskan bahwa manusia

perlu mengadakan perjalanan untuk melakukan penelitian tentang aneka peninggalan sejarah dan kebudayaan manusia. Penelitian ini dapat menyadarkan manusia bahwa ia adalah makhluk Allah yang fana. Segala sesuatu yang dikerjakan di dunia akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah sebagai hakim yang Maha Adil yang tujuannya berjumpa dengan Allah. Dan peradaban yang pernah dihasilkannya akan menjadi tonggak sejarah bagi generasi yang datang sesudahnya.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى ۚ اَفَلَمْ يَسِيرُوْا فِي  
الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ  
لِّلَّذِيْنَ اٰتَقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

Artinya :Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan Rasul) dan Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya? (Q.S. Yusuf Ayat 109).

Demikian pula di dalam surah Yusuf ayat 109 secara tegas menganjurkan agar menelusuri berbagai negeri. Ini merupakan isyarat bahwa manusia perlu mengenal budaya masyarakat dari berbagai belahan dunia. Kebudayaan suatu masyarakat tidak dapat dipahami secara holistik tanpa terlibat langsung di dalamnya. Ayat ini juga menegaskan betapa banyak umat terdahulu telah

dibinasakan Allah karena kedurhakaan mereka kepada ayat-ayatnya. Karena itu manusia harus menggunakan daya pikirnya untuk menemukan kebenaran, dan sekaligus meyakini kebenaran berita yang disampaikan al-Quran.

Walaupun banyak kenyataan yang cenderung mengarahkan Islam itu menerima pariwisata sebagai sesuatu yang dapat diterima, namun dalam kenyataannya dalam pariwisata banyak hal yang sangat bertentangan dengan etika dan moralitas kaum muslim. Pariwisata banyak bertoleransi dengan pakaian minim atau tak senonoh jika berhubungan dengan wisata pantai, fasilitas bar yang menyajikan minuman beralkohol, dan banyak lagi ke-“nazisan” atau hal-hal tidak sesuai dengan kaidah Islam.<sup>33</sup>

Resistensi Islam terhadap pariwisata akan sangat penting dan menjadi bermakna jika dihubungkan dengan jenis wisata apakah yang dikembangkan, jika kaum Muslim sebagai tuan rumah atau host, dan juga akan sangat penting dalam memilih daerah tujuan wisata jika kaum muslim sebagai wisatawan atau tourist. Resistensi juga akan menjadi ranah pribadi dalam hal pemilihan tujuan wisata dan akan sangat tergantung dari seberapa kuat kaum muslim memaknai etika dan moralitas pada ke-Islamannya.

Sudah saatnya pemerintah beserta seluruh stakeholder yang ada secara bersama membangun industri pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat melalui konsep pengembangan pariwisata yang diarahkan pada:

---

<sup>33</sup> Luthfi. 2006. *Is Islam Bad for Tourism?. Indonesian Matter*, retrieve form <http://www.indonesiamatters.com/674/islam-tourism/> pada 4-11-2010

- a. pariwisata alternatif yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan (rural Community Development);
- b. Pariwisata eko (eco-tourism) dalam bentuk pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan (environmental based Tourism Development);
- c. Pariwisata yang bertanggung jawab dan berkesinambungan (responsible and sustainable Tourism Development) dan
- d. Pariwisata spiritual atau agama yang berlandaskan fiqh siyasah.

Orientasi baru ini sangat mungkin dijadikan sebagai wahana untuk mengupayakan :

- a. Peningkatan interaksi positif antarmasyarakat, antarpenghuni dari satu daerah dengan daerah lainnya bahkan antar negara.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup baik fisik maupun lingkungan sosial budaya, dan
- d. Meningkatkan nilai-nilai spiritual umat beragama yang pada akhirnya dapat mengaktualisasikan keimanan dan rasa syukur pada Allah atas nikmat yang diberikan dengan segala kelebihanannya dalam bentuk memahami ayat-ayat kawniah di seluruh alam jagad raya.

### BAB III

## PERANAN DAN KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PAD MELALUI PARIWISATA

### D. Gambaran Umum di Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013.<sup>34</sup>

Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang- Undang No. 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012, dengan batas :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahu Kecamatan Balik Bukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh

---

<sup>34</sup> ["Kabupaten Pesisir Barat » Menuju Kota Modern Berbasis Lingkungan".  
www.pesisirbaratkab.go.id](http://www.pesisirbaratkab.go.id). Diakses tanggal 2018-01-29.

Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih.

- b. Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Naningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas  $\pm 2.889,88$  Km<sup>2</sup> atau 8,39% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, dengan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya sebagai petani dan nelayan. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 Kelurahan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar  $\pm 136.370$  jiwa. Secara geografis, posisi astronomi Kabupaten Pesisir Barat terletak antara koordinat  $04^{\circ}40'0''$  –  $06^{\circ}0'0''$  LS dan  $103^{\circ}30'0''$  –  $104^{\circ}50'0''$  BT. Secara administrasi, Kabupaten Pesisir Barat terdiri atas 11 Kecamatan sebagaimana yang terlihat pada Tabel berikut ini.



### Jumlah, Luas Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Pesisir Barat

Kecamatan	Luas (Km2)	%	Ibukota	Jumlah Pekon/ Kel
1. Bengkunt Belimbing	943,70	32.69	kota Jawa	14
2. Bengkunt	215,03	7.45	pardasuka	9
3. Ngambur	327,17	11,33	Negeri Ratu Ngambur	9
4. Pesisir Selatan	409,17	14,17	Biha	15
5. Krui Selatan	36,25	1,26	Way Napal	10
6. Pesisir Tengah	120,64	4,18	Pasar Krui	8
7. Way Krui	40,92	1,42	Gunung Kemala	10
8. Karya Penggawa	211,13	7,31	Kebuayan	12
9. Pesisir Utara	87,27	2,92	Kuripan	12
10. Lemong	454,99	15,76	Lemong	13
11. Pulau Pisang	43,61	1,51	Pasar Pulau Pisang	6
<b>Jumlah</b>	<b>2889,88</b>	<b>100</b>	<b>Jumlah</b>	<b>118</b>

Sumber : RIPPDA Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017

Kabupaten Pesisir Barat secara topografi dapat dibagi kedalam topografi dari permukaan laut, dimana mencakup seluruh Kecamatan wilayah Pesisir (Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan Pesisir Selatan) pada sepanjang pantai Barat wilayah ini. Topologi perbukitan, yang memiliki ketinggian antara 600-1000 meter di atas permukaan laut, yang meliputi TNBBS dan lain-lainnya terdmasuk dalam wilayah ini.

Kabupaten Pesisir Barat memilih Bupati dan Wakil Bupati definitif pertamanya secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah yang

dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dimenangkan oleh pasangan Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan Erlina, S.P., M.H. Sebelumnya kabupaten ini dipimpin oleh Penjabat Bupati Besisir Barat H. Kherlani, S.E. dan dilanjutkan oleh Penjabat Bupati Besisir Barat Drs. Qodratul Ikhwan, M.M.

Di Kabupaten Pesisir Barat jumlah sarana pendidikan tahun 2011 terdiri dari Sekolah Dasar sebanyak 187 buah , SLTP Negeri 41 buah dan swasta 9 buah, SMU Negeri 7 buah dan swasta 5 buah, SMK Negeri 4 buah dan swasta 18 buah, Jumlah lulusan siswa SD, SLTP, SLTA dan SMK Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2011 terdiri dari SD sebanyak 5.295 siswa, SLTP 3.939 siswa, SLTA 1.366 siswa dan SMK 1.980 siswa.

Secara topografi, wilayah Kabupaten Pesisir Barat dibagi menjadi tiga unit topografi, yaitu:

- a. Daerah dataran rendah, merupakan daerah dengan ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut.
- b. Daerah berbukit, Merupakan daerah dengan ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut.
- c. Daerah pegunungan, Merupakan daerah dengan ketinggian 1.000 sampai 2.000 meter dari permukaan laut.

Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat umumnya datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Di bagian Barat Laut Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit, yaitu Gunung

Pugung (1.964 m), Gunung Sebayon (1.744 m), Gunung Telalawan (1.753 m) dan Gunung Tampak Tunggak (1.744 m). Berdasarkan peta geologi Provinsi Lampung skala 1 : 250.000 yang disusun oleh S. Gafoer, TC Amin, Andi Mangga (1989), Pesisir Barat terdiri dari batuan vulkan tua (Old Quarternary Young), Formasi Simpang Aur, Formasi Ranau, Formasi Bal, Batuan Intrusive.

Kebudayaan Secara umum, Budaya Pesisir Barat meliputi aspek ide, konsep, pemikiran, bahasa, seni dan hasil kebudayaan itu sendiri berupa tinggalan material. Namun dalam kaitan dengan nominasi Budaya Pesisir Barat, sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia, aspek dominan yang dibicarakan adalah tinggalan budaya material. Hal itu terkait dengan upaya pelestarian dan perlindungannya. Walaupun pada dasarnya pelestarian itu nantinya juga akan menjangkau pelestarian budaya bukan benda.

#### **E. Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat**

Pesisir Barat memiliki potensi pariwisata yang begitu beragam, baik dari sisi produk wisata maupun pasar wisatawan. Dengan alam dan budaya yang dimiliki, Pesisir Barat menawarkan berbagai daya tarik wisata. Potensi pasar wisatawan Pesisir Barat juga tidak kalah besarnya. Keterkenalan pariwisata Pesisir Barat dengan budaya yang unik dan khas dan panorama alam yang indah telah dikenal di tingkat regional, nasional maupun mancanegara. Keunikan dan nilai sejarah dan budaya yang tinggi sehingga ODTW (Objek Daya Tarik Wisata).

Kawasan pesisir yang ada di Provinsi Lampung yang memiliki potensi

pariwisata yang besar diantaranya yaitu dari sektor bahari, religi, ekowisata dan event wisata. Kawasan wisata Kabupaten Pesisir Barat selain tercantum sebagai salah satu wisata unggulan Provinsi Lampung dalam rencana induk pengembangan pariwisata (RIPP) Provinsi Lampung 2012-2013, dalam peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 pasal 11 tentang Kepariwisata, beberapa obyek pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat juga merupakan suatu kawasan strategis dari beberapa kawasan pariwisata di Provinsi Lampung yang menjadi prioritas untuk dikembangkan, dengan menggunggulkan wisata bahari sebagai daya tarik wisatanya, dimana sebagian besar kawasan wisata Pesisir Barat yaitu wisata bahari. Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak pantai dengan jenis ombak yang berkualitas internasional sehingga sering dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang suka berselancar, tetapi disayangkan saat ini pariwisata di wilayah Pesisir Barat masih berkembang secara alami dan minim perhatian pemerintah, seperti di beberapa obyek wisata di Kabupaten Pesisir Barat, contohnya obyek wisata bahari di Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong yang memiliki potensi pariwisata namun belum ada tersedia sarana maupun prasarana oleh pemerintah setempat, akan tetapi ada juga beberapa kawasan pariwisata yang sudah mulai dikembangkan dan diberi fasilitas baik sarana dan prasarana yang sudah terbilang baik, kawasan pariwisata itu diantaranya kawasan wisata Labuhan Jukung di Kecamatan Pesisir Tengah, Pantai Tanjung Setia di Kecamatan Pesisir Selatan dan Pantai Karang Nyimbor di

kecamatan Pesisir Selatan. Kawasan pariwisata berikut wisatawan bisa merasakan fasilitas yang tersedia mulai dari penginapan, sarana hiburan, kuliner, dan kemudahan akses menuju kawasan wisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat tengah mengupayakan beberapa langkah strategis pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, rencana ini kemudian dituangkan kedalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat. Adapun pokok dari RIPPDA Kabupaten Pesisir Barat adalah mengembangkan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestaian lingkungan hidup dan budaya yang dilakukan melalui peningkatan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial, pengembangan obyek wisata potensial dengan meningkatkan aspek pemasaran pariwisata bagi wisatawan domestic maupun mancanegara, pengembangan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata yang bertumpu pada pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dan peningkatan infrastruktur pendukung bagi pengembangan kawasan pariwisata potensial.

#### **F. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat**

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Barat, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2011, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebagai SKPD

yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan teknis, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata, pengelolaan ketatausahaan Dinas, pelaksanaan tugas lain di bidang kebudayaan, pariwisata yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan latar belakang dan landasan pemikiran yang telah dikemukakan, maka telah tergambar keinginan dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang merupakan berbagai dasar pemikiran yang dirumuskan sebagai rambu-rambu didalam Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Barat pada masa mendatang yang penuh dengan harapan dan tantangan, dimana harus dipedomani oleh insan kebudayaan dan kepariwisataan untuk lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terencana dan berkesinambungan. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merumuskan Visi sebagai berikut: “Terwujudnya Daerah Wisata Budaya Dengan Kreatifitas Pengelolaan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.”

Dalam mengimplementasikan visi pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan tersebut diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan, akuntabel dan mengutamakan kepentingan masyarakat, yang mempunyai misi sebagai berikut adalah:



1. Melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai luhur.
2. Mendukung pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing global.
3. Melakukan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.
4. Menciptakan ketatalaksanaan yang bersih dan akuntabel serta layanan publik yang ramah.
5. Melakukan pembinaan dan kerjasama pengembangan seni budaya dan kerajinan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi maka ditetapkan tujuan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan tahun 2010 - 2016 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas masyarakat yang berbudi pekerti luhur beserta hasil karyanya.
2. Meningkatnya kemandirian dan daya saing dalam perekonomian daerah.
3. Meningkatnya pemerataan pembangunan objek wisata pada setiap wilayah.
4. Meningkatnya perlindungan, pelestarian dan pengembangan keragaman budaya Pesisir Barat dengan produk pariwisata yang inovatif.
5. Meningkatnya persatuan dan cinta tanah air serta kerjasama provinsi dan nasional dalam bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pesisir Barat.

Kabupaten pesisir barat mempunyai banyak tempat pariwisata yang sangat

potensial jika dikembangkan dengan baik, dan sudah berjaan seama ini ada 12

objek pariwisata yang di control pemerintah kabupaten Pesisir Barat yaitu :

1. Pulau Pisang
2. Pantai Tanjung Setia
3. Labuhan Jukung
4. Pantai Wayjambu
5. Pantai Nyimbor
6. Pantai Mandiri
7. Goa Matu
8. Penangkaran Penyu
9. Kebun Damar
10. Ekowisata Pemerihan
11. Rino Camp Sukaraja Atas
12. Pantai Measti



Dari keseluruhan pariwisata yang ada di pesisir barat itu merupakan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) kabupaten pesisir barat. Pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) saat ini dalam tahap pelaksanaan program pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat beberapa tahun ini dimaksimalkan, cara merupakan suatu langkah maju untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mendukung semua program pariwisata khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pesisir Barat.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diketahui bahwa DISBUDPAR saat ini mempunyai beberapa program antara lain :

1. Pengembangan statistic kepariwisataan
  - a. Pemantauan dan evalusai pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
  - b. Pelaksanaan promosi pariwisata daerah didalam dan luar negeri
  - c. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
  - d. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
  - e. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
  - f. Anaisa pasar promosi dan pemasaran obyek wisata
2. Program pengembangan pemasaran pariwisata pelatihan pemandu terpadu
  - a. Pengembangan proyek pariwisata unggulan
  - b. Program Pengembangan Destinasi Wisata
  - c. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
  - d. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana wisata
  - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran

- f. Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek wisata dengan lembaga dunia usaha
- g. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta standarisasi kepariwisataan
- h. Pengembangan daerah tujuan wisata
- i. Pariwisata

Kebudayaan di Pesisir Barat yang dapat memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pariwisata dan kebudayaan sebagai tempat wisata domestik dan internasional. Meskipun Pesisir Barat memiliki sejumlah potensi alam dan budaya yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap secara maksimal. Banyak pengelolaan wisata alam dan budaya di Pesisir Barat dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata diberbagai tempat obyek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat.

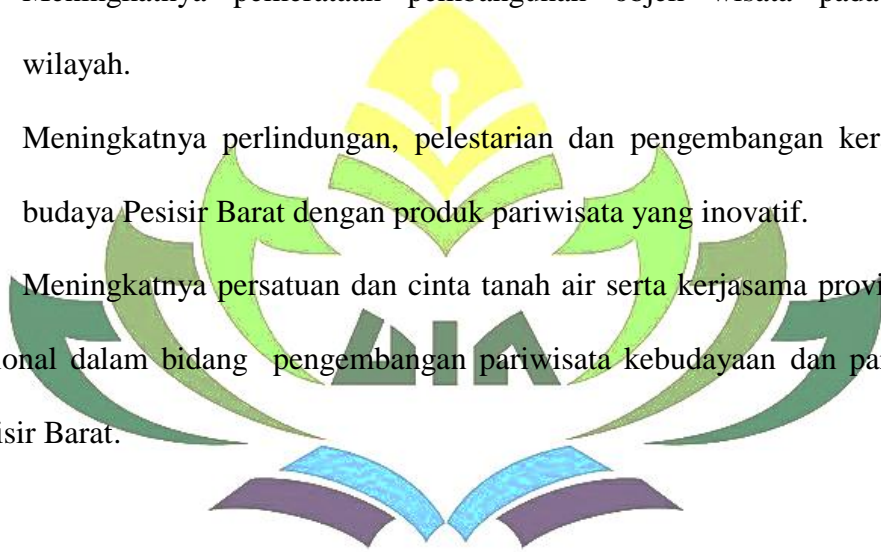
Kabupaten Pesisir Barat memiliki berbagai macam obyek wisata alam dan wisata budaya yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dengan tepat maka akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung maka akan secara langsung meningkatkan PAD.

Melakukan pembinaan dan kerjasama pengembangan seni budaya dan kerajinan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Tujuan berdasarkan Visi dan Misi maka ditetapkan tujuan pembangunan kebudayaan dan

kepariwisataan tahun 2010-2016 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas masyarakat yang berbudi pekerti luhur beserta hasil karyanya.
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing dalam perekonomian daerah.
3. Meningkatnya pemerataan pembangunan objek wisata pada setiap wilayah.
4. Meningkatnya perlindungan, pelestarian dan pengembangan keragaman budaya Pesisir Barat dengan produk pariwisata yang inovatif.

Meningkatnya persatuan dan cinta tanah air serta kerjasama provinsi dan nasional dalam bidang pengembangan pariwisata kebudayaan dan pariwisata Pesisir Barat.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **C. Peran Dan Kontribusi Pemerintah Terhadap Pandapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Alam di Kabupaten Pesisir Barat**





Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Barat, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor Tahun 2011, Dinas Kebudayaan, Pariwisata sebagai SKPD yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan teknis, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata, pengelolaan ketatausahaan Dinas, pelaksanaan tugas lain di bidang kebudayaan, pariwisata yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merumuskan Visi,

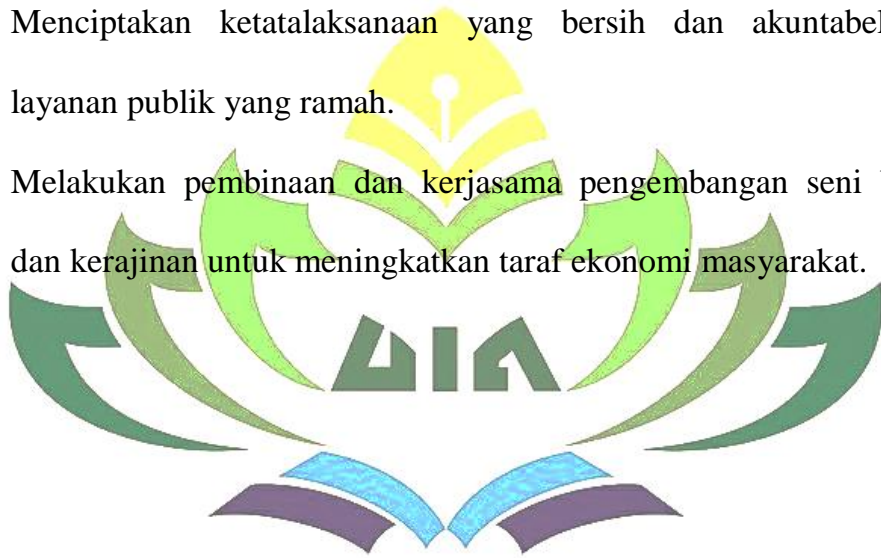
*“Terwujudnya daerah wisata budaya dengan kreatifitas pengelolaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.”*

Dalam mengimplementasikan visi pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan tersebut diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan, akuntabel dan mengutamakan kepentingan masyarakat, yang mempunyai misi sebagai berikut adalah:

1. Melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang

berlandaskan nilai luhur.

2. Mendukung pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing global.
3. Melakukan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.
4. Menciptakan ketatalaksanaan yang bersih dan akuntabel serta layanan publik yang ramah.
5. Melakukan pembinaan dan kerjasama pengembangan seni budaya dan kerajinan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.



Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, Dinas

Kabupaten Pesisir Barat menjabarkan Program Kerja pada tabel berikut:

No	Sasaran/ Program	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi kegiatan
1.	Program pengembangan destinasi pariwisata	Pengembangan Obyek wisata unggulan	Penataan, Pemeliharaan dan pengembangan obyek daya tarik wisata 15 objek	
2.	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata	Pemantauan Objek Wisata	Objek Wisata	
3.	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan Konstruksi Pembukaan Jalan Objek Wisata.</li> <li>2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5 Objek wisata</li> <li>2. Masyarakat dan Aparatur Pesisir Barat</li> </ol>	
4.	Peningkatan Pemasaran Dan Promosi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Alat Sarana Penunjang Promosi</li> <li>2. Pembangunan Jaringan Sistem Informasi</li> <li>3. Pemasaran Pariwisata Pesisir Barat</li> <li>4. Mengikuti Promosi pada Event Tetap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Alat dan Sarana</li> <li>2. Terbangunnya Jaringan Sistem</li> <li>3. Informasi Pemasaran</li> <li>4. Terselenggaranya Kegiatan Promosi Pariwisata Pesisir Barat</li> </ol>	

		(Pameran, Pasar Wisata di Dalam dan Luar Negeri)		
--	--	--	--	--



5.	Program Pengembangan Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penguatan informasi data base</li> <li>2. Pengembangan dan penguatan litbang kebudayaan dan pariwisata</li> <li>3. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan, pariwisata dan pemasaran</li> <li>4. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata</li> <li>5. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata</li> <li>6. Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wisatawan mancanegara</li> <li>2. Masyarakat</li> <li>3. Expo</li> <li>4. Pembentukan badan promosi</li> <li>5. workshop asosiasi forum pelaku industri pariwisata 4 jenis dalam setahun</li> <li>6. Pelatihan sertifikasi pramuwisata Se-kabupaten Pesisir Barat,</li> <li>7. Pelatihan pelayan prima, soft skill Para pengelola restoran dan hotel.</li> </ol>	
6.	Pengembangan Nilai Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya</li> <li>2. Konservasi benda Cagar Budaya</li> <li>3. Pendataan Sejarah dan Benda Cagar Budaya buku profil</li> <li>4. Pemugaran Benda Cagar Budaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Seni dan Pemerintah</li> <li>2. Objek Wisata</li> <li>3. Objek Wisata</li> <li>4. Objek Wisata</li> </ol>	

7.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya</li> <li>2. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>3. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah</li> <li>4. Pementasan kesenian dan Kebudayaan Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Seni dan Masyarakat</li> <li>2. Umum</li> <li>3. Umum</li> <li>4. Umum</li> </ol>	
8.	Pengelolaan Keragaman Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan festival budaya Daerah</li> <li>2. Lovely December</li> <li>3. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum</li> <li>2. Umum</li> </ol>	

Untuk pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Barat, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata mengeluarkan kebijakan pengembangan pariwisata yang mencakup kebijakan pokok, kebijakan pengembangan perwilayahan (keruangan/spasial), pengembangan produk wisata, pengembananagan pasar dan pemasaran, serta pengembangan SDM dan kelembagaan untuk lingkup Kabupaten Pesisir Barat.

#### 1. Kebijakan Pokok Pengembangan Pariwisata

- a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur serta pemberdayaan tugas dan fungsi organisasi dinas kebudayaan dan



parwisata sebagai fasilitator dan regulator pengembangan pariwisata.

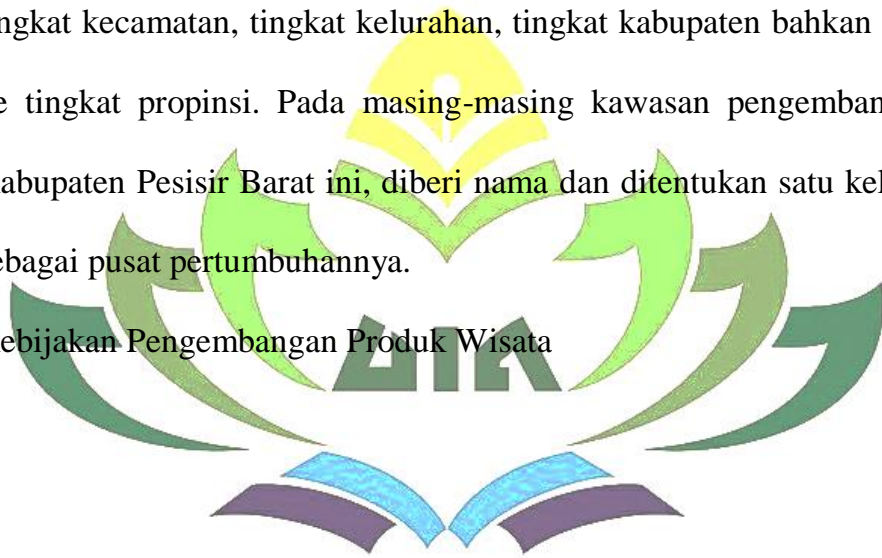
Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan aparatur dinas kebudayaan dan pariwisata ini dengan diadakannya MICE (meetings, incentives, conferencing and exhibitions).

- b. Melaksanakan kerjasama kebudayaan dan pariwisata antar daerah dan dunia usaha. Kerjasama yang dilakukan oleh Pesisir Barat adalah untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada di Pesisir Barat.
- c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata/ODTW dan pelestarian budaya. Salah satu contoh keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah dibuatnya took-toko souvenir di beberapa objek wisata.

## 2. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan

Upaya pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan salah satu kegiatan yang berimplikasi pada perencanaan dan pengembangan produk suatu wilayah. Pengembangannya harus menjangkau berbagai tingkat kecamatan mulai dari tingkat objek wisata, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat kabupaten bahkan sampai ke tingkat propinsi. Pada masing-masing kawasan pengembangan di Kabupaten Pesisir Barat ini, diberi nama dan ditentukan satu kelurahan sebagai pusat pertumbuhannya.

### 3. Kebijakan Pengembangan Produk Wisata



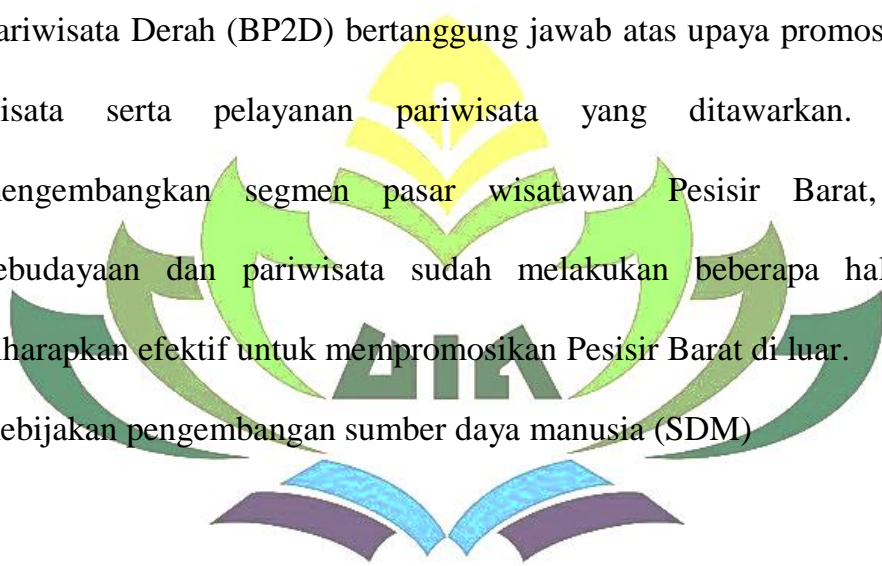
Pengembangan produk wisata Pesisir Barat berorientasi pada potensi dan daya tarik budaya yang unik dan khas yang didukung oleh budaya , seni dan sejarah serta keindahan panorama alam. Produk wisata ini dikembangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kecenderungan pasar pariwisata yang berkembang, terutama tema-tema wisata minat khusus yang dapat menarik wisatawan asing. Dalam pengembangan produk wisata ini, diperlukan penetapan produk wisata andalan bagi kabupaten Pesisir Barat sebagai faktor penarik utama bagi pengembangan pariwisata di kabupaten Pesisir Barat di tingkat regional, nasional dan internasional.

Dalam kaitannya dengan pengembangan produk wisata, obyek-obyek dan daya tarik wisata sejarah-budaya dan kesenian daerah serta event-event pariwisata masih harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui pengembangan dan pemantapan pembinaan seni dan budaya dan penyelenggaraan event seni budaya tertentu. Salah satu contohnya yaitu diadakannya event tahunan *Lovely December*.

#### 4. Kebijakan Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Dalam pemasarannya, citra pariwisata menjadi sangat penting. Oleh karena itu perlu dibangun identitas jatidiri dan citra yang menjadi tema utama pemasaran pariwisata Pesisir Barat. Pemasaran dan promosi pariwisata di daerah, pihak industri pariwisata bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah (BP2D) bertanggung jawab atas upaya promosi paket wisata serta pelayanan pariwisata yang ditawarkan. Untuk mengembangkan segmen pasar wisatawan Pesisir Barat, dinas kebudayaan dan pariwisata sudah melakukan beberapa hal yang diharapkan efektif untuk mempromosikan Pesisir Barat di luar.

5. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM)



Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari produk kebudayaan dan pariwisata yang beragam, sesuai dengan identitas daerah. Penyiapan sumber daya manusia tidak hanya bagi aparaturnya pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan generasi muda, tetapi penting pula dipersiapkan berbagai penyuluhan mengenai pariwisata (peluang dan dampaknya) bagi masyarakat awam. Salah satu kebijakan yang sudah mulai dijalankan di bidang pengembangan SDM ini adalah pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan di daerahnya dengan bantuan untuk kelompok-kelompok usaha kecil di objek wisata tertentu. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata juga berusaha meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata dan kemampuan komunikasi khususnya SDM yang berhadapan langsung dengan wisatawan.

#### 6. Kebijakan Pengembangan Institusi/Kelembagaan

Secara sederhana, kelembagaan diartikan sebagai totalitas unsur-unsur kepariwisataan yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Meskipun merupakan bagian dari sistem kepariwisataan, namun aspek kelembagaan tidak mudah dibentuk dan tidak dapat bekerja secara otomatis. Peningkatan institusi/kelembagaan juga dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Pesisir Barat dalam rangka promosi pariwisata. Salah satu penerapannya yaitu menjalin kerjasama dengan Travel Agencies. Objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat pada umumnya dikelola oleh pihak keluarga selaku pemilik objek wisata tersebut, dengan tetap mengenakan tarif retribusi kepada wisatawan dan meneruskannya kepada pemerintah daerah sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati No 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, seperti yang dirangkum pada tabel di bawah ini:

**Tabel**

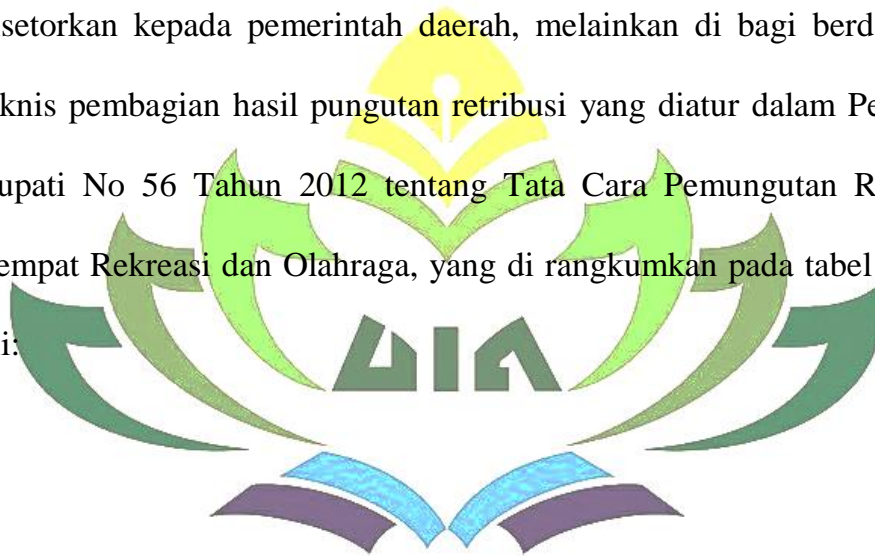
**Besarnya Tarif Retribusi untuk Pengunjung Objek Wisata**

No	Golongan Tarif	Tarif
1	Anak-anak/siswa/Mahasiswa	Rp 3.000
2	Peneliti/Karya Wisata/tamu PEMDA	Rp 5.000



3	Dewasa/Umum/Wisatawan Nusantara	Rp 10.000
4	Wisatawan Mancanegara	Rp 20.000

Hasil penerimaan dari retribusi objek wisata tidak semuanya disetorkan kepada pemerintah daerah, melainkan di bagi berdasarkan teknis pembagian hasil pungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati No 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang di rangkumkan pada tabel berikut ini:



**Tabel**  
**Teknis Pembagian Retribusi**

No	Jenis	Pembagian Hasil	
1	Yayasan (akte notaris)	60 % untuk yayasan	40 % untuk Pemda
2	Non Yayasan	50 % untuk objek	50 % untuk Pemda

	(keluarga)	wisata	
--	------------	--------	--

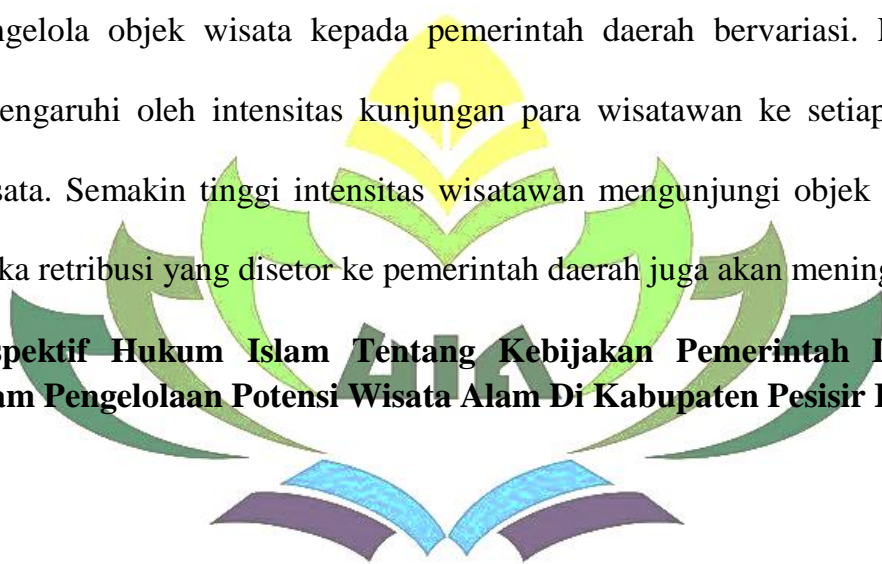
Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Kebijakan yang efektif yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu usaha untuk mengoptimalkan PAD. Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan target penerimaan dari setiap komponen PAD . Untuk Kabupaten Pesisir Barat, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam kontribusinya terhadap PAD.

Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Pesisir Barat berasal dari retribusi daerah berupa retribusi tempat rekreasi. Retribusi ini berasal dari beberapa objek wisata baik itu wisata alam, wisata budaya maupun wisata agro yang banyak di kunjungi oleh para wisatawan dan telah memiliki retribusi, namun masih terdapat beberapa objek wisata yang sebenarnya sudah dikunjungi oleh para wisatawan tetapi belum dikelola sepenuhnya sehingga belum dilakukan pungutan retribusi. Adapun realisasi yang tidak mencapai target dikarenakan minimnya dana yang dibutuhkan, sehingga mempengaruhi program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pesisir Barat.

Masalah anggaran memang merupakan hal yang menyulitkan. Sumber daya non manusia ini dianggap sangat minim, sehingga hampir semua program kerja selalu terkendala. Anggaran merupakan bagian dari program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Kondisi keuangan lambatnya dana dikucurkan sangat berdampak terhadap pelaksanaan rencana strategi dalam hal ini program. (Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran).

Hal ini dijelaskan lebih rinci oleh kepala dinas, keterbatasan anggaran yang diberikan membuat program tidak dapat berjalan maksimal. Misalnya, ingin merencanakan program besar, tetapi sulit karena hal tersebut. Besarnya retribusi perbulan yang disetor oleh pengelola objek wisata kepada pemerintah daerah bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh intensitas kunjungan para wisatawan ke setiap objek wisata. Semakin tinggi intensitas wisatawan mengunjungi objek wisata, maka retribusi yang disetor ke pemerintah daerah juga akan meningkat.

**D. Perspektif Hukum Islam Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Alam Di Kabupaten Pesisir Barat**



Pariwisata dalam kamus bahasa Arab disebut *Rihlah* artinya aktivitas perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu. Pariwisata secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun atas dua suku kata: “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali-kali berputar-putar, lengkap. Wisata berarti perjalanan, bepergian. Undang-undang RI No. 9 Tahun 1990 menyebutkan antara lain dalam pasal 1 (1) wisata adalah kegiatan perjalanan sebagai dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata; lebih jauh di dalam ayat (3) pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk penguasaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

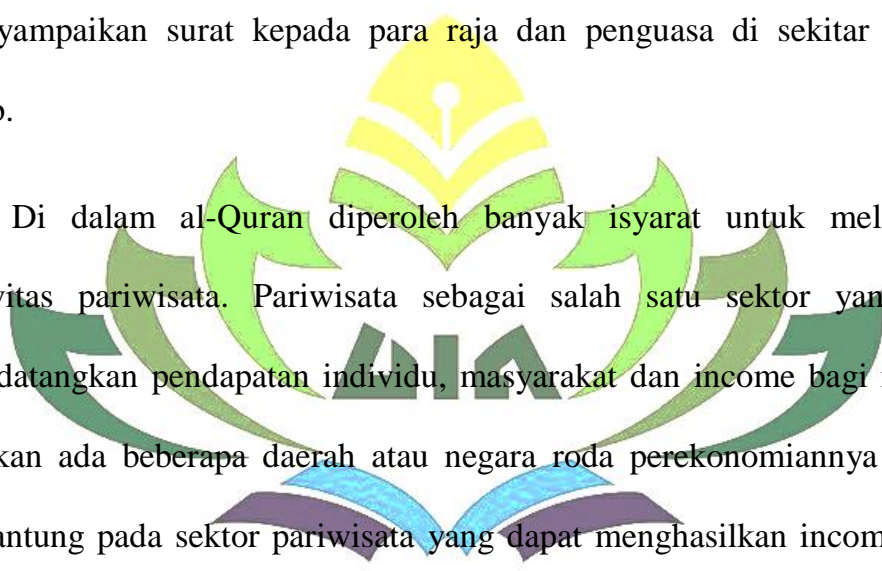
Wisata bisnis, Perjalanan ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab di masa lampau karena menyadari bahwa kondisi geografis negeri mereka yang tandus, gersang dan panas. Mereka lebih memilih profesi dagang dari pertanian yang bergantung pada alam meskipun ada sebagian kecil yang berkebun kurma. Demikian juga bangsa penjajah seperti: Portugis, Inggris dan Belanda yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Para pedagang biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya, mencari barang yang diproduksi suatu tempat untuk dijual ke tempat lain.

Wisata ilmiah, Perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, penelitian, studi banding guna memperoleh ilmu atau ingin meneliti objek tertentu seperti sumber daya yang dimiliki dalam rangka menyempurnakan aspek-aspek kekurangan dan kelemahannya. Sebagai contoh sabda nabi tuntutlah ilmu sampai ke negeri cina. Di hadist lain disabdakan *Rasulullah* “*barangsiapa berpindah untuk mempelajari suatu ilmu, maka ia diberi ampunan sebelum melangkah* (HR Tirmizi).

Perjalanan dakwah menunjukkan bahwa setelah Rasulullah saw wafat, para sahabat menyebar ke berbagai wilayah baru. Mereka rela meninggalkan kampung halaman (Madinah) yang subur, maju dan berperadaban tinggi menuju daerah lain yang masyarakatnya terbelakang atau belum mengenal Islam. Kepergian mereka semata-mata untuk kepentingan penyebaran agama dan bukan mencari nafkah atau ingin menguasai daerah lain.



Perjalanan diplomasi adalah perjalanan seseorang yang ditugaskan oleh penguasa dalam urusan ketatanegaraan, misalnya ambassador. Aktivitas tersebut dapat juga dilakukan oleh orang-orang yang “mampu” ketika beberapa orang sahabat mendapat tugas dari Rasulullah untuk menyampaikan surat kepada para raja dan penguasa di sekitar jazirah Arab.



Di dalam al-Quran diperoleh banyak isyarat untuk melakukan aktivitas pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang bisa mendatangkan pendapatan individu, masyarakat dan income bagi negara. Bahkan ada beberapa daerah atau negara roda perekonomiannya sangat tergantung pada sektor pariwisata yang dapat menghasilkan income yang banyak. Misalnya daerah yang memiliki letak geografis yang indah, keragaman seni dan budaya, sarana dan prasarana transportasi dan akomodasi, khazanah peninggalan sejarah yang kaya, maka pariwisata sebagai objek industri sangat menjanjikan dikembangkan.

Di dalam surat al-‘Ankabut ayat 19-20

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٠٩﴾  
 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : dan Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian mengulanginya (kembali). Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dalam iayat ini menegaskan bahwa manusia perlu mengadakan perjalanan untuk melakukan penelitian tentang aneka peninggalan sejarah dan kebudayaan manusia. Penelitian ini dapat menyadarkan manusia bahwa ia adalah makhluk Allah yang fana. Segala sesuatu yang dikerjakan di dunia akan dimintakan pertanggung jawaban di hadapan Allah sebagai hakim yang Maha Adil yang tujuannya berjumpa dengan Allah. Dan peradaban yang pernah dihasilkannya akan menjadi tonggak sejarah bagi generasi yang datang sesudahnya.

Demikian pula di dalam surah Yusuf ayat 109

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۖ أَفَلَمْ يَسِيرُوا  
 فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ  
 لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan Rasul) dan Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya?

secara tegas menganjurkan agar menelusuri berbagai negeri. Ini merupakan isyarat bahwa manusia perlu mengenal budaya masyarakat dari berbagai belahan dunia. Kebudayaan suatu masyarakat tidak dapat dipahami secara holistik tanpa terlibat langsung di dalamnya. Ayat ini juga menegaskan betapa banyak umat terdahulu telah dibinasakan Allah karena kedurhakaan mereka kepada ayat-ayatNya. Karena itu manusia harus menggunakan daya pikirnya untuk menemukan kebenaran, dan sekaligus meyakini kebenaran berita yang disampaikan al-Quran.

Surat al-Rum ayat 41-42 menyatakan bahwa :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٥٢﴾

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

Kehancuran yang terjadi di permukaan bumi adalah karena kecerobohan dan tindakan manusia sendiri. Kandungan ayat-ayat ini menjelaskan bahwa manusia dapat menyaksikan langsung kehancuran di belahan berbagai dunia sebagai akibat dari perilaku negatif manusia. Terjadinya bencana alam seperti banjir, polusi udara, air dan tanah serta erosi adalah akibat perbuatan manusia yang tidak beriman.

Industri pariwisata sangat erat kaitannya dengan produk dari jasa, seperti transportasi, akomodasi, perhotelan, jasa boga bahkan keahlian berbahasa asing yang dapat memberdayakan sumber daya insani maupun sumber daya alam, seperti keindahan panorama alam, juga benda-benda bersejarah yang merupakan bagian dari objek wisata. Untuk maksud ini aktivitas pariwisata harus mempunyai tujuan yang jelas dan efektif sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat walaupun dalam proses pelaksanaannya mengalami berbagai pengalaman, yang menguntungkan ataupun merugi.

Namun demikian pernyataan Al-Quran yang menjelaskan tentang pariwisata berakhir pada keinginan Allah swt untuk memberikan kesadaran kepada makhluknya yang diberi amanat sebagai khalifah agar dapat mengetahui kebenaran dan kebesaran serta kemahakuasaan-Nya Allah swt.

Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi telah menimbulkan berbagai kesadaran baru yang semakin meningkat terhadap problema sosial, ekonomi dan lingkungan yang semakin mengglobal dalam desa buana. Pariwisata international yang hanya mengedepankan komersialisme, eksploitasi sumber daya alam, seks, jalinan kemitraan usaha jasa (travel, transportasi, akomodasi, hiburan, entertainment) menemui titik kejenuhan. Pada gilirannya kepuasan yang dicari ternyata tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan jasmani saja, akan tetapi kebutuhan rohani/spiritual juga menjadi tuntutan tersendiri. Untuk itu pariwisata mengalami pergeseran nilai dari pariwisata yang identik dengan maksiat menjadi maslahat untuk pemenuhan spiritual. Dengan mengalihkan objek wisata ke tempat-tempat yang dianggap sakral dalam kepercayaan agama, seperti perjalanan umrah plus tujuan Palestina, Turki, Yarussalem, Bukhara, Yordania atau ke Mesir, negerinya Firaun.



Sudah saatnya pemerintah beserta seluruh *stakeholder* yang ada secara bersama membangun industri pariwisata di Aceh melalui konsep pengembangan pariwisata yang diarahkan pada (1) pariwisata alternatif yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan (*rural Community Development*); (2) pariwisata eko (*eco-tourism*) dalam bentuk pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan (*environmental based Tourism Development*); (3) pariwisata yang bertanggung jawab dan berkesinambungan (*responsible and sustainable Tourism Development*) dan (4) pariwisata spiritual atau agama.

Orientasi baru ini sangat mungkin dijadikan sebagai wahana untuk mengupayakan (1) peningkatan interaksi positif antarmanusia, antarpenduduk dari satu daerah dengan daerah lainnya bahkan antar negara. (2) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup baik fisik maupun lingkungan sosial budaya, dan (4) meningkatkan nilai-nilai spiritual umat beragama yang pada akhirnya dapat mengaktualisasikan keimanan dan rasa syukur pada Allah atas nikmat yang diberikan dengan segala kelebihanannya dalam bentuk memahami ayat-ayat kawniah di seluruh alam jagad raya

Dari paparan singkat ini akan memberikan sedikit pencerahan bagaimana seharusnya pariwisata itu disikapi dan diapresiasi sekaligus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam segenap prosesnya menuju kesempurnaan.

Strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam mengembangkan potensi pariwisata yaitu

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Objek Wisata



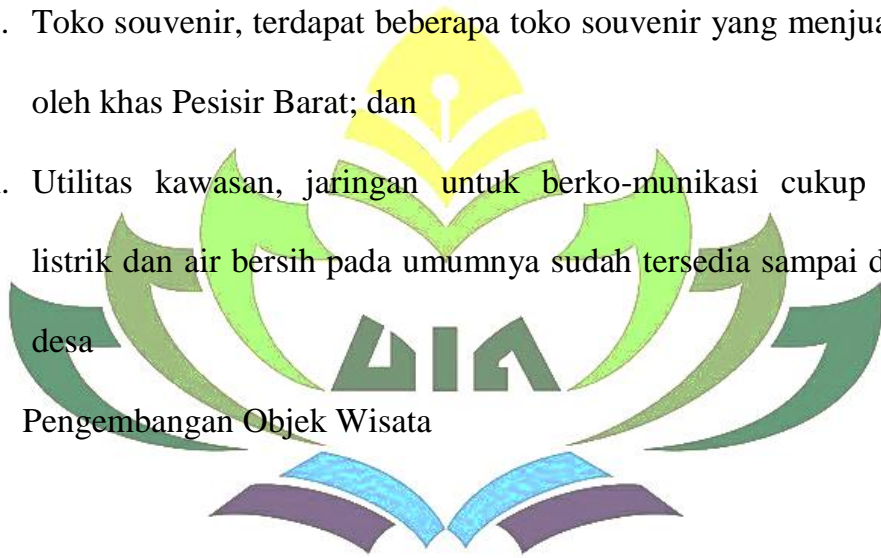
Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah. Pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana. Sarana sesuai dengan namanya menyediakan kebutuhan pokok yang ikut menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata. Fasilitas yang tersedia dapat memberikan pelayanan kepada para wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung. Menurut Yoeti (1996) yang dimaksud prasarana pariwisata adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat di dalam penyediaan sarana dan prasarana wisata yang ada di Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

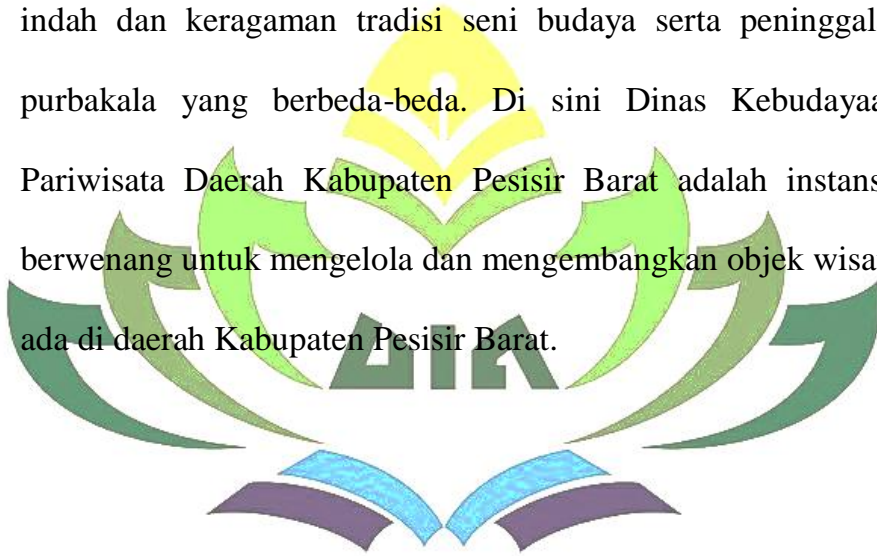
- a. Hotel atau penginapan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 32
- b. Rumah makan atau restoran atau warung makan berjumlah 20 unit dan sudah memiliki ijin usaha
- c. Karaoke/Cafe berjumlah 13 unit
- d. Travel/ biro perjalanan wisata sebanyak 10

- e. Tourist Information Center 1 unit
- f. Fasilitas transportasi, di Kabupaten Pesisir Barat sudah tersedia berupa angkutan umum seperti: mini bus, bus, dan angkutan pedesaan.
- g. Toko souvenir, terdapat beberapa toko souvenir yang menjual oleh-oleh khas Pesisir Barat; dan
- h. Utilitas kawasan, jaringan untuk berko-munikasi cukup lancar, listrik dan air bersih pada umumnya sudah tersedia sampai di desa-

## 2. Pengembangan Objek Wisata



Daerah Pembangunan di bidang pariwisata merupakan upaya-upaya untuk mengembangkan dan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah dimiliki oleh suatu daerah agar lebih baik lagi. Karena di tiap-tiap daerah pastinya memiliki kekayaan alam yang indah dan keragaman tradisi seni budaya serta peninggalan dan purbakala yang berbeda-beda. Di sini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat adalah instansi yang berwenang untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata yang ada di daerah Kabupaten Pesisir Barat.



Menurut Yoeti (2008) pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya. Dalam melakukan pengembangan pariwisata pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat memberikan tanggung jawab kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat untuk terus mengembangkan potensi pariwisata di tiap-tiap objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat. Salah satu usaha melestarikan alam serta lingkungan alam adalah dengan mengembangkan pariwisata sesuai kebutuhan masing-masing objek wisata tersebut. Konsentrasi untuk pengembangan objek-objek wisata di Pesisir Barat dilakukan dengan mengembangkan objek wisata yang sudah punya nama atau sudah dikenal banyak orang seperti objek wisata pantai Tanjung Setia dan selanjutnya pengembangan di objek wisata Pesisir Barat yang lain. Jadi, tidak langsung dilakukan pengembangan pada keseluruhan objek wisata karena terbentur



dengan dana yang didapat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

### 3. Peran Serta Masyarakat

Dalam mengembangkan objek wisata daerah di Kabupaten Pesisir Barat sangat penting dibutuhkan peran aktif dari masyarakat sekitar. Karena secara tidak langsung upaya pengembangan pariwisata daerah akan berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar itu sendiri. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat melakukan beberapa langkah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar, yaitu:

- a. Mengadakan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat sekitar objek wisata untuk menciptakan masyarakat yang sadar wisata;
- b. Ikut serta masyarakat dalam melestarikan dan menjaga alam dan hutan khususnya;
- c. Mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan di lokasi wisata dengan mungkin mengadakan kerja bakti bersama-sama;
- d. Ikut melestarikan budaya adat-istiadat yang di sekitar objek wisata, budaya kuliner, dan lain-lain; serta
- e. Keindahan, dan keramahan terhadap pengunjung

## Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat

### a. Faktor Pendukung

- a) Objek wisata yang sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas. Karang Ngimbor, Pantai Tanjung Setia dan Pulau Pisang, sudah dikenal oleh masyarakat luas di sekitar Kabupaten Pesisir Barat, hal ini juga mempengaruhi minat wisatawan yang ingin berkunjung ke Pesisir Barat untuk melihat objek wisata tersebut. Selain itu, tawaran pesona objek wisata yang lain seperti Pantai Melasti sudah mulai dilirik oleh wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Pesisir objek wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Pendapatan dari sektor pariwisata Kabupaten Pesisir Barat juga menjadi salah satu kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam dua tahun terakhir (2011 -2012) kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD yaitu Rp 322.795.200 dan Rp 342.197.600. Jumlah ini merupakan akumulasi dari setoran tiap-tiap objek wisata, dengan setoran terbesar diperoleh dari objek wisata Pantai Tanjung Setia yaitu sebesar Rp 75.658.000.

- b) Partisipasi masyarakat sekitar, adanya peran langsung dari

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah berupa bimbingan dan keterlibatan terjun ke lapangan tempat wisata yang juga ikut meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Partisipasi masyarakat berupa ikut menjaga kebersihan dan keamanan di objek wisata.

- c) Mudah nya koordinasi antar pihak terkait, adanya hubungan baik antara pihak dinas kebudayaan dan pariwisata dengan masing-masing pengelola ketiga objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat. Hubungan baik ini bisa dilihat lewat keaktifan para pengelola objek wisata dalam menyetor dana retribusi, serta koordinasi dinas pariwisata dengan para pengelola objek wisata dalam event-event tahunan sebagai sarana promosi objek wisata.

#### b. Faktor Penghambat

- a) Dana yang terbatas Faktor yang mempengaruhi tidak dan lancarnya pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat adalah keterbatasan dana. Sektor pariwisata merupakan sektor pilihan bukan sektor yang wajib di dahului oleh pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga

mengupayakan secara maksimal dalam anggaran di bidang pariwisata karena pariwisata daerah merupakan aset yang dimiliki dan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat sendiri.

b) Lokasi geografis objek wisata. Bagi objek wisata yang berada jauh dari pusat kota seperti Goa Matu dan Pulau Pisang dijangkau wisatawan dengan kendaraan umum. Hal ini dikarenakan letaknya yang cukup jauh dan kurangnya akses langsung dari pusat kota ke objek wisata.

c) Minimnya dan tidak terpusatnya Informasi Kesulitan yang dialami wisatawan khususnya wisatawan asing adalah minimnya informasi mengenai suatu objek wisata, serta tidak dimaksimalkannya *Tourist Information center*. Sehingga para wisatawan harus mencari informasi sendiri mengenai objek wisata, letaknya dan apa saja yang ditawarkan dari objek wisata tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

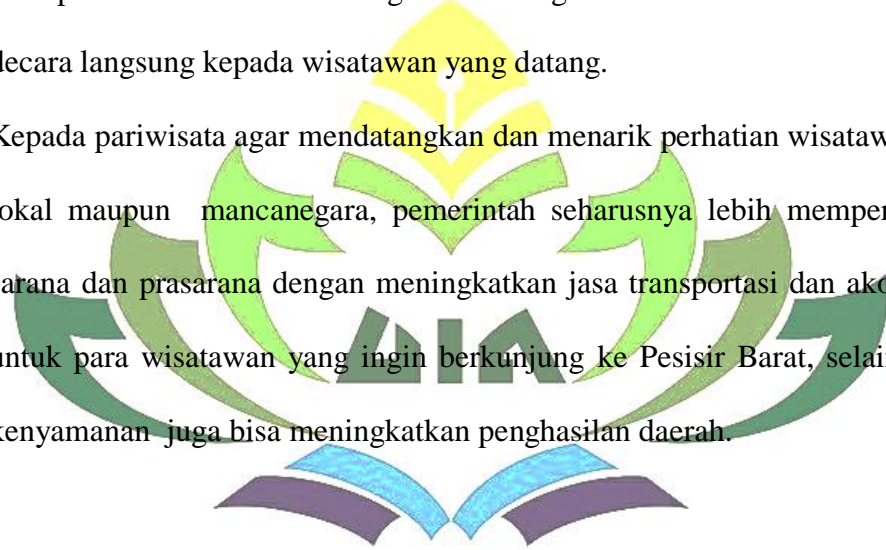
1. Peran dan kontribusi pemerintah bahwa pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yang belum berjalan maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah. Untuk memaksimalkan potensi pariwisata yang ada pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat saat ini sedang mengupayakan beberapa langkah strategis pengembangan pariwisata, ini tertuang di dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat.
2. Adapun perspektif hukum Islam tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai salah satu sektor yang bisa mendatangkan pendapatan individu, masyarakat dan income bagi negara.

### **B. Saran**

1. Kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Barat seharusnya lebih memperhatikan SDM di Dinas Pariwisata yang masih belum maksimal dari segi kuantitas, adanya posisi jabatan yang belum terisi, seharusnya akan lebih maksimal jika beberapa posisi yang belum tersisi tersebut mulai diduduki, sehingga semua

pekerjaan akan lebih mudah terkontrol dan sesuai dengan peran (bidang) dan fungsinya.

2. Kepada masyarakat juga semestinya membantu menjaga infrastruktur sarana dan prasaranya yang ada, akan lebih baik jika pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat ditingkatkan dengan membantu mensosialisasikan decara langsung kepada wisatawan yang datang.
3. Kepada pariwisata agar mendatangkan dan menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun mancanegara, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan sarana dan prasarana dengan meningkatkan jasa transportasi dan akomodasi untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke Pesisir Barat, selain untuk kenyamanan juga bisa meningkatkan penghasilan daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sammeng Mappi, *Cakrawala Pariwisata*, Jakarta : Balai Pustaka 2001
- Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006
- Ensiklopedi tematis dunia Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3. t.t.
- Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al-Fida' Ismail, *Tafsir al-Quran alKarim*, (Dar Maktabah al-Hilal, Beirut, cet 1, 1986 M)
- Ibnu Qaiyum al-Jauzi, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbi al-Alamin* ,(dar Jail, Baerut, 1973 M)
- Jamaluddin al-Qasimin, *Mahasin al-Ta'wil*, (Maktabah al-Halabi, Cairo, tanpa tahun),
- Komarudin. *Ensiklopedia Manajemen*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara 1994
- Kodyat, RA. *Statistik Induktif Terapan*. Yogyakarta: BPFE UGM. 2001
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000
- Manulang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Nita Triana, *Membangun Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pemerintahan Daerah (Perspektif Hukum Islam)* Bandar Lampung : 2014
- Pendit, Nyoman S, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1999



Pitana, I gededanPutu G. *Sosiologipariwisata*.CV Andi Offset. Yogyakarta, 2005

Prihadhi, Endra K. *My Potensi*. Jakarta: Elek Media Komputindo. 2004

Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: Grasindo, 2009

Salah Wahab,*Manajemen Kepariwisata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita,2003

Said Quthub, *Fizhila Li al-Quran*, (Dar Syuruq, Cairo, 2001 M), juz 5

Syamsurizal. *Peluang di BidangPariwisata*. Jakarta: MutiaraSumber Widya, 2007

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004

Sukardi, Nyoman.. *PengantarPariwisata*. STP Nusa Dua Bali.Bali, 1998

Shobir Thoimah, *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, Dar Al-Ajil, Beirut.

Suwantoro, G. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta :Balai Pustaka, 2004

Suwarjoko, Warpani & Warpani P. Indira. *Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah*. Bandung : ITB. 2007

Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009

Yoeti, Oka, A. *Anatomi Pariwisata*. Bandung, Angkasa. 1996